

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN KOLAM RENANG
KAWASAN WISATA CANDI PENATARAN**

(Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar
dan Masyarakat sekitar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AWINDA WIDYA PUTRI PRATAMA
125030107111075



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2017

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Awinda Widya Putri Pratama

Judul : Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam
Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan
Wisata Candi Penataran (Studi pada Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan
Masyarakat sekitar)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Mardiyono, M.PA
NIP. 19520523 197903 1 001

Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIP. 201201 830129 1 001

Penguji I

Penguji II

Andhyka Mutaggin, S.AP, M.PA
NIP. 201107 850421 1 001

Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 19840713 201504 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 13 Juli 2017

MATERAI
TEMPEL

4DR30AEF2123270

6000

Awinda Widya Putri Pratama
NIM. 125030107111075

CURRICULUM VITAE

Nama : Awinda Widya Putri Pratama

NIM : 125030107111075

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 28 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : 1. SD Negeri Dadaplangu 01

2. SMP Negeri 2 Srengat

3. SMA Negeri 1 Srengat

4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Alamat Asal : Desa Dadaplangu RT 004/RW 001

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

Alamat di Malang : Taman Sulfat Boulevard IX/5 Kota Malang



LEMBAR PERSEMBAHAN

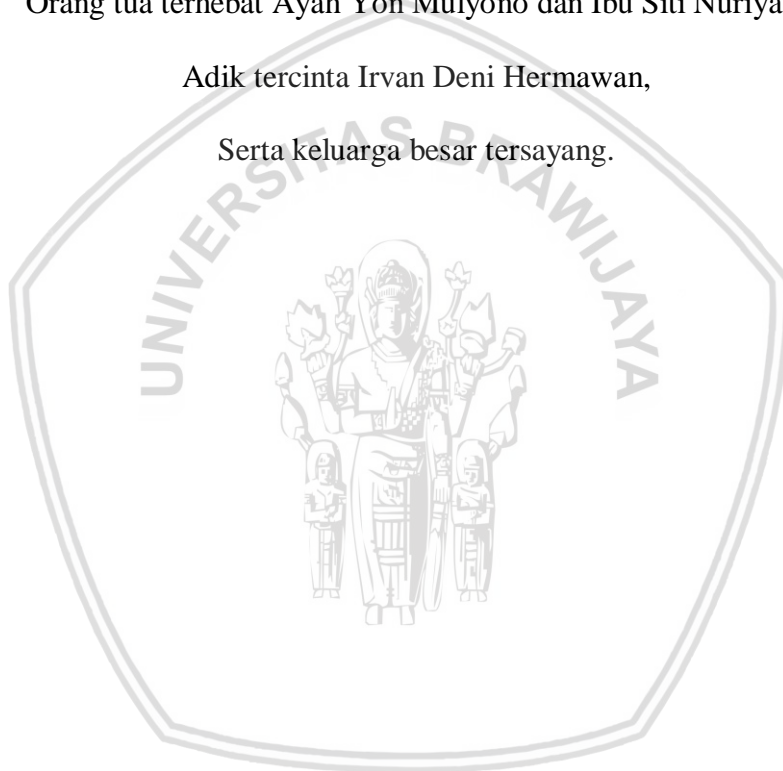
Karya tulis skripsi ini kupersembahkan:

Untuk yang selalu menyayangiku, selalu melindungiku, selalu membimbingku,
selalu mendoakanku dan selalu memberikan semangat serta dukungan moril
maupun materiil. Begitu pula sebaliknya, yang selalu kuhormati dan kusayangi.

Orang tua terhebat Ayah Yon Mulyono dan Ibu Siti Nuriyah,

Adik tercinta Irvan Deni Hermawan,

Serta keluarga besar tersayang.



RINGKASAN

Awinda Widya Putri Pratama, 2017, **Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran** (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Masyarakat sekitar). Dr. Mardiyono, M.PA, Nurjati Widodo, S.AP, M.AP.

Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu pendukung dalam pembangunan adalah bidang kepariwisataan. Pembangunan pariwisata, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi peran dari swasta dan masyarakat juga diperlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu kemitraan, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berkaitan dengan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dengan fokus peran pemerintah daerah, peran masyarakat, serta kemitraan yang terjalin. Serta faktor pendukung dan penghambat kemitraan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Blitar, sedangkan situs penelitian adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari kemitraan yang terjalin, yakni kemitraan mutualistik. Dimana dalam kemitraan masing-masing pihak memberikan manfaatnya satu sama lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adanya faktor pendukung, yakni rencana strategis, kualitas sumber daya manusia yang memadai, dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar, kesadaran masyarakat mulai muncul, lokasi keberadaan kolam renang dan akses menuju destinasi yang mudah. Sedangkan faktor penghambat adalah minimnya pendanaan dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar, belum ada peraturan daerah tentang kepariwisataan, belum ada promosi khusus dan belum adanya peran dari pihak swasta.

Saran yang dapat diberikan adalah menjalin komunikasi, harus ada kesepakatan tertulis, segera dibentuk peraturan daerah tentang kepariwisataan, diharapkan pemerintah lebih responsif, serta masyarakat harus lebih kreatif dan inovatif, melakukan promosi wisata dan perlu melibatkan peran dari pihak swasta.

Kata kunci: Kemitraan, Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan, Pengelolaan dan Pariwisata.

SUMMARY

Awinda Widya Putri Pratama, 2017, **Partnership of Local Government and Community in the Development and Management of Swimming Pool of Candi Penataran Tourist Area.** (Study on Tourism Culture Youth and Sports District Blitar and Surrounding Community). Dr. Mardiyono, M.PA, Nurjati Widodo, S.AP, M.AP.

Development is an effort improve the life of the nation and the country heading into a better direction. One of the supporters in development is the field of tourism. The development of tourism, not just the responsibility of governments, but the role of the private sector and the community are also required. This is in accordance with the principles of good governance that is a partnership, then the necessary co-operation between government, the private and the public in the development of tourism. Based on the background, the research relates to local government and community partnership in development and management of swimming pool of candi penataran tourist area, focusing on the role of government, the role of the community, as well as the partnership is created. As well as supporting factor and a barrier to partnership.

This research uses descriptive research methods with qualitative approach, through this research can identify the expected partnership established between the local authorities and communities, as well as the factors that affect the partnership. Location of Blitar Regency is research, while research sites is Tourism Culture Youth and Sports District Blitar and surrounding community. The technique of data collection by way of interviews, observation and documentation. As for data analysis using interactive model Miles, Huberman and Saldana that consists of data collection, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion.

The results of this research is a partnership of local governments and communities are already good enough. It is seen from the partnerships established, namely partnership mutualism. The partnership of each party gives benefits to each other, so no parties who feel aggrieved. The presence of a supporting factor, i.e. the strategic plan, the quality of human resources, support the local government County of Blitar, public awareness began to appear, the presence of a swimming pool and easy access to destinations. While restricting factor is the lack of funding from the regional government of the Regency of Blitar, there has been no local regulations on tourism, there is no special promotions and yet the existence of the role of private parties.

Advice that can be given is to establish communication, there must be a written agreement, soon formed local regulations regarding tourism, the government expected more responsive, as well as the public should be more creative and innovative, doing promotional tours and the need to involve the role of private parties.

Keywords: Partnership, Government, Community, Development, Management and Tourism.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Masyarakat sekitar)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mardiyono, M.PA dan Bapak Nurjati Widodo, S.AP, M.AP selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya berupa saran dan masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam segala hal selama masa perkuliahan.
6. Kepala dinas dan seluruh staf Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, serta semua pihak yang sudah berkenan

- memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
7. Keluarga tercinta Ayah Yon Mulyono, Ibu Siti Nuriyah dan Adik Irvan Deni Hermawan, serta keluarga besar terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini.
 8. Teman-teman tersayang Achita, Anggi, Ayun, Denny, Dian, Erni, Isya, Nadya A, Nadya B, Merin, Mery, Vungky, Albertus, Doni, Dwima, Fendika, Galuh, Lukman, Yudi terima kasih atas segala semangat, motivasi dan dukungan yang diberikan selama ini.
 9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi 2012, serta seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya 2012 terima kasih telah berbagi ilmu, pengalaman dan cerita selama berada di kampus Universitas Brawijaya tercinta ini.

Dalam penyusunan skripsi penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin, namun demi kesempurnaan saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan referensi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Good Governance</i>	13
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	13
2. Prinsip <i>Good Governance</i>	15
3. Unsur <i>Good Governance</i>	16
4. Hubungan Unsur <i>Good Governance</i>	18
B. Administrasi Pembangunan.....	21
1. Pengertian Administrasi.....	21
2. Pengertian Pembangunan.....	22
3. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	25
C. Pemerintah Daerah.....	26
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	26
2. Fungsi Pemerintah Daerah.....	27
3. Peran Pemerintah Daerah.....	29
4. Otonomi Daerah.....	30
5. Desentralisasi.....	32
D. Partisipasi Masyarakat.....	33
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	33
2. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat.....	35
3. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat.....	36
4. Faktor Partisipasi Masyarakat.....	37

E. Kemitraan	39
1. Pengertian Kemitraan	39
2. Prinsip Kemitraan	41
3. Tujuan Kemitraan	43
4. Bentuk Kemitraan	44
F. Pariwisata	46
1. Pengertian Pariwisata	46
2. Bentuk dan Jenis Pariwisata	48
3. Potensi Pariwisata	49
4. Destinasi Pariwisata	50
5. Wisatawan	51
G. Sarana dan Prasarana Pariwisata	53
1. Sarana Pariwisata	53
2. Prasarana Pariwisata	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	55
B. Fokus Penelitian	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Instrumen Penelitian	60
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	66
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar	66
a. Kondisi Geografis	66
b. Kondisi Demografi dan Luas Wilayah	67
c. Visi dan Misi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	69
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar	71
a. Visi dan Misi	71
b. Struktur Organisasi	72
c. Tugas Pokok dan Fungsi	73
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	80
1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran ...	80
a. Peran Pemerintah Daerah	83
b. Peran Masyarakat	93
c. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	96
2. Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran	101
a. Faktor Pendukung	101
b. Faktor Penghambat	106

C. Analisis Pembahasan	111
1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran ...	111
a. Peran Pemerintah Daerah.....	113
b. Peran Masyarakat	118
c. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	119
2. Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran.....	123
a. Faktor Pendukung.....	123
b. Faktor Penghambat	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Jumlah Pengunjung Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar pada Tahun 2014-2016.....	8
2. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan pada Tahun 2014.....	68



DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
1. Hubungan 3 (tiga) Domain dalam <i>Good Governance</i>	19
2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana.....	63
3. Peta Kabupaten Blitar	66
4. Stuktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar	72
5. Suasana dalam Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran	82
6. Kolam Renang Anak-anak	84
7. Kolam Renang Arus.....	84
8. Kolam Renang Dewasa	84
9. Tempat Penitipan Barang, Penyewaan Ban Pelampung dan Baju Renang ..	85
10. Karcis Parkir	86
11. Tiket Masuk Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran untuk Anak-anak dan Dewasa.....	86
12. Tempat Parkir Motor dan Mobil.....	87
13. Kamar Mandi Bilas Laki-laki dan Perempuan	88
14. Wahana <i>Waterboom</i> dan Air Mancur	89
15. Wahana Bermain Ayunan	90
16. Area Tempat Duduk.....	90
17. Pujasera dan Karaoke.....	90
18. Petugas Karcis Parkir dan Pedagang.....	92
19. Loket Tiket dan Pintu Masuk	92
20. Pedagang	95
21. Skema Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dalam tataran akademik, Indonesia mengalami sebuah perubahan dari konsep *government* menuju kepada konsep *governance*. Konsep *government*, pemerintah ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Pemerintah juga menjadi penyandang dana terbesar sekaligus sebagai penerima keuntungan terbesar. Sedangkan dengan berkembangnya konsep *governance* pola hubungan antar sektor publik dan swasta, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah berubah menjadi lebih sejajar dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan pelayanan publik atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak saja. Hal ini selain untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, juga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsep *good governance* yang di dalamnya terdapat sebuah kemitraan atau kerjasama antar *stakeholder* yaitu pemerintah (*state*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Sedarmayanti (2004:5) menjelaskan fungsi *state* menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Proses kerjasama ketiga *stakeholders* tersebut tidak hanya berperan dalam lingkup nasional, tetapi juga lingkup daerah. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan

yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pembangunan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Menurut Siagian (2014:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara untuk menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa dan negara (*nation building*). Pembangunan nasional yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan tentunya memiliki visi dan misi dalam membangun sebuah negara. Sedangkan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pencapaian pembangunan nasional, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah agar tercapai pembangunan nasional yang merata.

Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut yang di dalamnya terdapat asas otonomi dengan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin besarnya tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya dengan memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil, serta untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dan mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk terlaksananya pemerintahan daerah yang baik, hal ini dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Mengingat masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek dalam pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan (Gaventa dan Valderama dalam Huraerah (2008:99). Sebagai subjek masyarakat merupakan mitra dari pemerintah atau pihak terkait lainnya. Selanjutnya masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.

Menurut Keith Davis dalam Huraerah (2008:95) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggungjawab terhadapnya. Peran serta masyarakat sangat penting, mengingat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat tidak ikut dalam implentasinya. Pembangunan tersebut juga akan berdampak pada masyarakat secara langsung, baik secara positif maupun negatif. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan masyarakat agar pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak yang positif sehingga dapat meminimalisir dampak negatifnya.

Di Indonesia, pemerintah daerah dengan masyarakat melakukan kerjasama pada berbagai sektor dalam pembangunan daerah. Mengingat banyak potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang belum digali. Kedua *stakeholders* tersebut merupakan mitra dalam pembangunan yang harus saling

membantu agar tujuan dari pembangunan daerah dapat tercapai. Menurut Sulistiyani (2004:130) kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pada suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Saat ini, telah banyak kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah dengan masyarakat, salah satu bentuk kerjasama pada bidang yang sangat potensial yaitu bidang kepariwisataan.

Pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama dalam pembangunan sektor pariwisata. Kerjasama merupakan langkah yang harus dilakukan, karena tidak ada pihak yang sangat berkuasa dan memiliki segalanya. Seperti yang diungkapkan oleh Rohmad (2009:3):

“Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerjasama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor swasta maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggungjawab sebagai pelaku dan penentu pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal, begitupun dengan sektor swasta”.

Pariwisata dalam beberapa waktu terakhir ini memang menjadi salah satu sektor yang mulai diperhitungkan. Pembangunan sektor pariwisata mempunyai peran penting, disamping sebagai penggerak perekonomian guna mengentaskan kemiskinan dan juga diharapkan membuka kesempatan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran. Wahab (1997:55) juga berpendapat bahwa:

“Pariwisata adalah salah satu industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, *standart* hidup, serta menstimulasi sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri kerajinan tangan dan cinderamata, serta penginapan dan transportasi secara ekonomis yang juga dipandang secara industri”.

Selain itu pariwisata juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat batiniah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 3 juga menyebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada pasal 4 menyebutkan, tujuan dari pembangunan potensi pariwisata sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Mengatasi pengangguran.
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
6. Memajukan kebudayaan.
7. Mengangkat citra bangsa.
8. Memupuk rasa cinta tanah air.
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan tujuan dari pembangunan potensi pariwisata tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan pada sektor pariwisata memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Sehingga pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara maksimal, agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Hal ini dikarenakan pariwisata pada era otonomi daerah merupakan wujud dari cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan

umum dalam arti bahwa, jika pariwisata dikelola dengan baik maka akan memberikan pelayanan yang baik dan manfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar daerah destinasi pariwisata, terutama pada sektor perekonomian. Pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat memang sudah seharusnya dilakukan, selain untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, juga untuk menggali potensi daerah.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cukup banyak potensi pariwisata adalah daerah Kabupaten Blitar, sektor pariwisata yang dimiliki berpotensi untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Blitar antara lain:

1. Kawasan wisata candi penataran di Kecamatan Nglegok yang terdiri dari:
 - a. Candi penataran.
 - b. Kolam renang.
 - c. Museum penataran.
 - d. Lapangan tenis.
 - e. Flying fox dan panjat dinding.
 - f. Raiser ikan koi.
 - g. Makam Syech Subakir.
2. Arung jeram di sungai lekso dan sungai tiko di Kecamatan Gandusari.
3. Petilasan rambut monte di Kecamatan Gandusari.
4. Candi-candi peninggalan sejarah yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar.
5. Kawasan wisata gunung kelud.
6. Wisata alam yang terdiri dari:
 - a. Kawasan wisata pantai tambakrejo di Kecamatan Wonotirto.
 - b. Kawasan wisata pantai serang di Kecamatan Panggungrejo.
 - c. Kawasan wisata pantai jolosutro di Kecamatan Wates.
 - d. Kawasan wisata pantai peh pulo di Kecamatan Panggungrejo.
 - e. Goa embultug dan goa ngetup di Kecamatan Bakung.
 - f. Goa jedog di Kecamatan Kademangan.
7. Wisata sejarah yaitu monumen trisula di Kecamatan Bakung.
8. Wisata buatan yang terdiri dari:
 - a. Bendungan lahor di Kecamatan Selorejo.
 - b. Bendungan serut di Kecamatan Kanigoro.
 - c. Bendungan wlingi raya di Kecamatan Talun.

9. Desa wisata ekologis yakni Desa Semen dan Desa Tulungrejo di Kecamatan Gandusari.
10. Pagelaran budaya antara lain:
 - a. Prosesi peringatan hari jadi Kabupaten Blitar setiap tanggal 5 Agustus.
 - b. Festival penataran.
 - c. Gelora pesona bumi penataran.
 - d. Purnama seruling penataran oleh Dewan Kesenian Kabupaten Blitar (DKKB) yang digelar pada bulan purnama.
 - e. Gelar upacara adat larung sesaji di pantai tambakrejo dan pantai serang setiap tanggal 1 Syuro.
 - f. Siraman gong Kyai Pradah setiap tanggal 12 Maulud.
 - g. Perayaan melasti di pantai jolosutro.

Beberapa obyek pariwisata yang terdapat di daerah Kabupaten Blitar masih banyak yang pengembangan dan pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari hanya beberapa tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Blitar, melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang masuk dalam retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada 6 (enam) obyek pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yakni:

1. Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran di Kecamatan Nglegok.
2. Kawasan Wisata Olak Alen atau Lahor (Ngreco) di Kecamatan Selorejo.
3. Pantai Jolosutro di Kecamatan Wates.
4. Pantai Tambakrejo di Kecamatan Wonotirto.
5. Pantai Serang di Kecamatan Panggungrejo.
6. Rambut Monte di Kecamatan Gandusari.

Berdasarkan dari obyek pariwisata tersebut, berikut ini adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan pada obyek pariwisata di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar pada Tahun 2014-2016.

Tahun	Wisatawan Nusantara (WN)	Wisatawan Mancanegara (WM)	Total
2014	595.616	143	595.759
2015	744.345	64	744.409
2016	992.638	83	992.721

Sumber: Diolah peneliti dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tahun 2017.

Berdasarkan data tabel 1, dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 sebesar 595.759 pengunjung. Selanjutnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 744.409 pengunjung dan pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebanyak 992.721 pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun wisatawan di Kabupaten Blitar meningkat secara signifikan jika pemerintah daerah lebih meningkatkan pembangunan sektor pariwisata.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sektor pariwisata sebagai modal dasar pembangunan daerah. Sektor pariwisata di Kabupaten Blitar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pembangunan dan pendayagunaan potensi daerah terus ditingkatkan. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, salah satunya pada bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar mempunyai kewenangan untuk melakukan pembangunan sektor pariwisata yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan, serta kewenangan untuk mengelola obyek pariwisata agar lebih maksimal pelayanan publik yang diberikan.

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar, salah satu yang mendukung dan dijadikan sebagai ikon wisata adalah kawasan wisata candi penataran. Kawasan wisata candi penataran tersebut yang dikelola oleh pemerintah daerah, yakni obyek wisata kolam renang. Kolam renang kawasan wisata candi penataran merupakan salah satu sektor yang dinilai dapat memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Blitar. Selain itu, dengan berkembangnya kolam renang kawasan wisata candi penataran sebagai obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Blitar, maka akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga perekonomian meningkat dan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Demi tercapainya tujuan dari pembangunan daerah, maka diperlukan upaya dari para *stakeholders* terkait yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Peran dari masing-masing *stakeholders* dalam melakukan pembangunan sektor pariwisata harus lebih ditingkatkan lagi, hal ini dilakukan agar pembangunan dapat dilakukan secara maksimal baik pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung, serta diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan mendorong program pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan wisata candi penataran, khususnya masyarakat yang menjadi mitra dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Hal ini dilakukan karena

pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk melakukan pengembangan pada industri kepariwisataan lokal guna tercapainya pembangunan daerah.

Sesuai pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk menyoroti kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran yang sesuai dengan konsep *good governance*, namun peneliti lebih fokus pada peran pemerintah daerah dan masyarakat dengan tidak mengabaikan peran dari pihak swasta. Hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Masyarakat sekitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan faktor yang mempengaruhi kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.
 - a. Sebagai salah satu kajian dalam studi administrasi publik dan membangun pemikiran pengembangan ilmu administrasi publik.
 - b. Diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan informasi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan mampu memberikan gambaran dan wawasan khususnya bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan masyarakat sekitar yang berperan langsung dalam pembangunan sektor pariwisata kolam renang kawasan wisata candi penataran.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah gambaran secara singkat antar bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan sebagai acuan dalam membahas dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam tinjauan pustaka ini, teori yang digunakan merupakan kutipan pendapat dari para ahli baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data fokus penelitian. Kemudian data-data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan teori yang digunakan.

BAB V : Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah garis besar dari hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan dari pemikiran peneliti yang diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Paradigma manajemen publik baru dalam implementasinya ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi inilah yang mendorong munculnya berbagai kritik dan kemudian melahirkan konsep baru yang biasa disebut dengan istilah *governance*. Kooiman dalam Rewansyah (2010:81) menyatakan bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan masyarakat tersebut. Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Rewansyah (2010:81) juga mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah sosial pada semua tingkatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut juga bahwa *governance* adalah instrumen kebijakan publik untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesifitas sosial masyarakat. Istilah dan konsep *governance* ini mulai berkembang pada tahun 1990-an yang ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dan sistem pemerintahan.

Istilah *governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, pandangan ini muncul karena kewenangan pemerintah dianggap terlalu besar, sehingga masyarakat tidak memiliki keterlibatan dalam sistem pemerintahan. Kritikan ini juga yang menjadi semangat tercetusnya konsep *good governance*. Secara konseptual menurut Basuki (2006:8) pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa *good governance* (pemerintahan yang baik) adalah suatu manajemen pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing unsur atau domain dari *good governance* dalam suatu pemerintahan. Oleh sebab itu, aspek yang penting dalam mewujudkan *good governance* ialah adanya pola interaksi yang saling bersinergi antara negara, swasta dan masyarakat. Sehingga dalam hal pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran sangat diperlukan.

2. Prinsip *Good Governance*

Memahami mekanisme dalam praktek penyelenggaraan *good governance*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan yang dikehendaki. *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam Sjamsuddin, S (2005:66) mensyaratkan ada 10 (sepuluh) karakteristik atau prinsip yang harus dianut, dikembangkan dan saling memperkuat serta tidak dapat berdiri sendiri untuk terselenggaranya *good governance* yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip partisipasi (*participation*). Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak berpendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Prinsip supremasi hukum (*rule of law*). *Good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi. Salah satu syarat hidup demokratis adalah mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak dengan menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- c. Prinsip transparansi (*transparency*). Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan, agar dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai untuk diakses.
- d. Prinsip daya tanggap (*responsiveness*). Dalam proses pembangunan *good governance* diperlukan daya tanggap dengan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- e. Prinsip membangun konsensus (*consensus orientation*). Pengambilan keputusan di dasarkan pada konsensus. Konsensus bukanlah hal baru, karena nilai-nilai dasar dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.
- f. Prinsip kesetaraan (*equity*). Setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
- g. Prinsip efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*). Menjamin terselenggaranya pelayanan publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- h. Prinsip akuntabilitas (*accountability*). Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga. Hal ini untuk meningkatkan

- akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- i. Prinsip visi strategis (*strategic Vision*). Setiap domain dalam *good governance* perlu memiliki visi yang strategis. Hal ini dikarenakan untuk membangun daerah harus berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
 - j. Prinsip profesionalisme (*profesionalism*). Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya penataan hubungan sosial yang lebih efektif dan efisien dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Begitu pula dengan terjalinnya kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Hal ini agar proses kemitraan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang dikendaki.

3. Unsur *Good Governance*

Good governance memiliki beberapa unsur. Menurut Basuki (2006:9) menyebutkan terdapat 3 (tiga) kategori dalam unsur-unsur *good governance* yakni:

- a. Negara atau pemerintahan.
Konsep pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu juga melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta.
Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti: industri pengolahan, perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk sektor informal.

c. Masyarakat madani.

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup perseorangan maupun kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Unsur pertama dalam konsep *good governance* adalah sektor pemerintah.

Secara etimologis dalam Bahasa Indonesia pemerintah merupakan subjek yang berdiri sendiri. Sebagai suatu subjek, pemerintah berarti memiliki tugas dan kegiatan yang dilakukan. Siagian (2008:128) menjelaskan terdapat 2 (dua) fungsi utama yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu:

a. Fungsi Pengaturan.

Titik penyelenggaraan fungsi pengaturan adalah bahwa negara sebagai suatu hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semua orang di dalamnya harus taat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

b. Fungsi Pelayanan.

Fungsi pelayanan adalah pemerintahan yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut.

Unsur kedua dalam konsep *good governance* adalah sektor swasta.

Sektor swasta ialah sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Sektor swasta sebagai pelaku dalam hal ini mencakup perusahaan-perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, koperasi dan secara informal lainnya dalam beberapa kegiatan yang bersifat penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, investasi, dan pengembangan usaha.

Unsur ketiga, konsep *good governance* adalah masyarakat madani.

Sumarto (2009:15) menjelaskan bahwa masyarakat madani adalah kelompok sosial yang eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dalam kelompok

sosial tersebut meliputi organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, organisasi keagamaan yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.

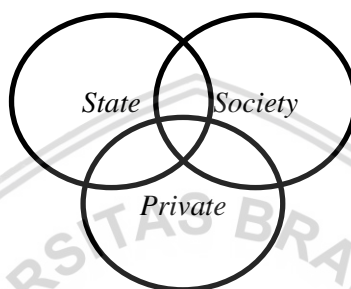
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bersama, cita-cita yang dimaksud salah satunya adalah kesejahteraan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tercapai apabila ketiga unsur yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berkerjasama dengan baik, karena setiap pelaku dalam *good governance* memiliki peranan dan tugas masing-masing. Sesuai dengan kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana setiap *stakeholder* memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan.

4. Hubungan Unsur *Good Governance*

Terdapat 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2004:280) negara merupakan salah satu unsur *governance*, yang di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga publik. Swasta meliputi perusahaan yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lain. Terdapat banyak anggapan bahwa sektor swasta merupakan bagian dari masyarakat. Namun sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat, yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik dan

ekonomi dengan aturan formal maupun non formal. Sedangkan masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan komunitas.

Setiap komponen *good governance* memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara, hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2004:307) yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan 3 (tiga) Domain dalam *Good Governance*.

Sumber: Sedarmayanti (2004:307).

Penjelasan dari gambar 1 tersebut, dapat dijelaskan hubungan dari ketiga domain dalam *good governance* adalah bahwa setiap komponen memiliki peran dan tugas masing-masing, yakni:

- a. Negara (*state*) menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Negara berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kekuasaan pemerintah dan membangun lingkungan kondusif untuk tercapainya pemerintahan dan pembangunan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b. Swasta (*private*) menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran swasta sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena sebagai sumber peluang meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Masyarakat (*society*) berperan dalam hal sosial, menggerakkan kelompok masyarakat dan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut *United Nation Development Progame (UNDP)* dalam Sinambela (2006:48) juga mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) pihak yang berpengaruh dalam *good governance* berperan sebagai pelaku, diantaranya:

- a. Negara atau pemerintah.
 1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
 2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
 3. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*;
 4. Menegakkan hak asasi manusia;
 5. Melindungi lingkungan hidup;
 6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
- b. Sektor swasta.
 1. Menjalankan industri;
 2. Menciptakan lapangan kerja;
 3. Menyediakan insentif bagi karyawan;
 4. Meningkatkan standart hidup karyawan;
 5. Memelihara lingkungan hidup;
 6. Menaati peraturan;
 7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
 8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
- c. Masyarakat madani.
 1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
 2. Mempengaruhi kebijakan publik;
 3. Sebagai sarana *check and balance* pemerintah;
 4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
 5. Mengembangkan sumber daya manusia;
 6. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Good governance akan lebih berfungsi dengan baik apabila ketiga komponen tersebut saling bermitra. Sedarmayanti (2004:307) menyimpulkan bahwa meskipun komponen *good governance* memiliki ideologi yang berbeda, yang mana ideologi negara adalah kekuasaan, swasta adalah *capital* (modal) dan masyarakat adalah demokrasi dan kebebasan tetapi ketiga pihak tersebut harus dapat bermitra, bukan hanya untuk mencapai tujuan masing-masing melainkan

untuk mencapai tujuan yang sama yaitu berkehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, bahwa ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dalam mewujudkan *good governance*. Negara atau pemerintah menjadi komponen yang dominan dalam mewujudkan *good governance*, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan. Fungsi dari peraturan salah satunya adalah untuk memfasilitasi komponen sektor swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan juga melekat dalam komponen ini. Sehingga ketiga komponen tersebut saling terkait dan mempengaruhi, termasuk dalam hal pembangunan. Seperti halnya pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran yang melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pembangunan, untuk memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua *stakeholders* tersebut memiliki peran dan fungsi yang terkait dan mendukung demi tercapainya tujuan bersama.

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut Syafiie (2006:14) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha. Memang tata usaha merupakan unsur-unsur dari pada administrasi

dalam arti luas, secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut: a) pengorganisasian; b) manajemen; c) tata hubungan; d) kepegawaian; e) keuangan; f) pembekalan; g) tata usaha; dan h) perwakilan.

Siagian (2014:4) juga berpendapat bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, menurut Tjiptoherijanto (2010:104) administrasi adalah proses yang harus dijalani untuk mencapai tujuan kelompok, artinya proses administrasi tersebut harus dijalani oleh semua pihak yang memiliki tujuan bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses kegiatan kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang dikendaki.

Administrasi juga berlaku dalam pembangunan sektor kepariwisataan, yakni salah satunya dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dalam pelaksanaannya kerjasama yang terjalin yakni antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Proses kerjasama tersebut juga menerapkan unsur-unsur administrasi untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerjasama yang terjalin, sehingga tujuan dapat dicapai dengan mudah.

2. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan menurut Siagian (2014:4), pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara untuk menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa

(*nation building*). Menurut Siagian (2014:4) sedikitnya ada 7 (tujuh) ide pokok tentang pembangunan. Pertama, pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari beberapa tahap. Kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Maksudnya jika ada kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

Ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. Keempat, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang, sedangkan pertumbuhan suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Keenam, modernitas dicapai melalui berbagai pembangunan yang bersifat multi dimensional, artinya modernitas mencakup segala bidang kehidupan. Ketujuh, pembangunan usaha pembinaan bangsa yang bersangkutan semakin kukuh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa lain.

Selain itu, pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan suatu bangsa dan negara. Perubahan ini terjadi disetiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun berkaitan dengan kelestarian alam. Sehingga pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya yang memiliki implikasi utama seperti yang dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Suryono (2010:35) antara lain:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dengan cara membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain (*independence*).

Pada dasarnya pembangunan merupakan pendayagunaan potensi masyarakat secara maksimal dengan cara ikut partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, pembangunan sendiri berarti upaya atau proses untuk memperbaiki dalam segala bidang ke arah kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah segala proses yang terencana dan terstruktur untuk menghadapi segala perubahan melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi

penataran, dimana dalam proses pembangunannya pemerintah daerah melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam seluruh proses pelaksanaannya.

3. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam rumpun administrasi negara. Fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Administrasi pembangunan mempunyai fokus analisis khusus yang tidak merupakan fokus analisis disiplin-disiplin ilmiah lain, yaitu penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara. Pengertian administrasi pembangunan itu sendiri menurut Siagian (2014:4) adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara terencana dalam semua segi kehidupan bangsa dan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapain tujuan akhirnya.

Tjokroamidjojo (1995:14) menyebutkan bahwa ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi:

- a. Pertama, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu penyusunan kebijaksanaan penyempurna administrasi negara yang meliputi: usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya, ini disebut sebagai *the development of administration*. Fungsi lainnya adalah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan diberbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif, ini disebut sebagai *the administration of development*.

- b. Kedua, administrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya secara efektif.

Menurut Kartasasmita (1997:5) administrasi pembangunan adalah sebagai *agent of change* yang bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat penting dan terlibat dalam pengalokasian sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan administrasi pembangunan merupakan proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini juga terlihat dalam proses kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Keduanya bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan bagi masing-masing pihak yang terlibat.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan tingkat regional. Pemerintah daerah sebagai pemegang kendali dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 1 ayat 2

disebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 3 disebutkan pula pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam sistem NKRI. Pembangunan daerah salah satunya yakni pembangunan pada bidang kepariwisataan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini juga terjadi pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana terjalin kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi dari pemerintah begitu penting, ketika pemerintah menjadi sebagai pengatur, pengelola dan pengendali dalam suatu pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pengertian dari pemerintah itu sendiri adalah suatu sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial,

ekonomi dan politik. Menurut Kartasapoetra dan Misdayanti dalam Soekanto (1990:20) pemerintah khususnya pemerintah daerah merupakan sub sistem dari NKRI yang mempunyai tugas-tugas untuk mencapai cita-cita dan tujuan pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya, adapun beberapa fungsi yang harus dipenuhi, diantaranya: a) fungsi otonomi; b) fungsi pembantuan; c) fungsi pembangunan; dan d) fungsi lainnya.

Kaufman dalam Thoha (1995:101) juga menyebutkan fungsi pemerintahan untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Jabatan birokrasi merupakan konsep *trias politica*, yaitu kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni kekuasaan legislatif yang memiliki tugas sebagai pembuat undang-undang; kekuasaan eksekutif yang memiliki tugas sebagai pelaksana undang-undang; serta kekuasaan yudikatif yang memiliki tugas mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu terdapat pula kekuasaan yang disebut dengan inspektif, yaitu lembaga yang berhubungan dengan keuangan negara seperti Badan Pengelola Keuangan (BPK).

Adanya fungsi-fungsi tersebut diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat berkoordinasi atau bekerjasama yang baik. Dengan demikian akan tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Hal ini termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, salah satunya yakni pada

pembangunan bidang pariwisata. Pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsinya dalam proses pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat. Dengan begitu pemerintah daerah akan lebih mudah dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Peran Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah yang memiliki tugas dan peran dalam menjalankan fungsinya. Menurut Rasyid (2000:13) menyebutkan ada 6 (enam) tugas umum pemerintah, yakni:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkan perlakuan yang adil kepada setiap masyarakat.
- d. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- e. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
- f. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan.

Berdasarkan dari tugas-tugas tersebut, peranan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh peran pemerintah daerah sebagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, salah satunya mengenai pembangunan sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perannya dalam pembangunan diharapkan terdapat prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjalankan

peranannya dengan maksimal. Peran pemerintah daerah dikatakan kuat apabila di dalam peranannya terdapat partisipasi dari masyarakat, seperti pada kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

4. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 juga disebutkan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Widjaja (2002:76) juga berpendapat bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan menentukan peraturan daerah sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:46) mengungkapkan bahwa dilakukan otonomi daerah karena pemerintah pusat mendesentralisasikan hak atau wewenangnya di dalam pengelolaan publik kepada pemerintah daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Menurut Mardiasmo (2002:46) ada 3 (tiga) tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
- c. Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan menurut Widjaja (2002:76) tujuan dari adanya otonomi daerah adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan tersebut antara lain untuk mengembangkan daerah diberbagai sektor, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah di dalam proses pertumbuhan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, salah satunya urusan pada bidang pariwisata. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar melakukan perannya dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran yang berkerjasama dengan masyarakat sekitar. Hal ini dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara meningkatkan semua elemen dalam pelayanan publik kepada masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

5. Desentralisasi

Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Conyers dalam Muluk (2009:5) mengungkapkan bahwa desentralisasi dibagi dalam 2 (dua) jenis yang berbeda, yaitu: pertama, *devolution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal. Kedua, *deconcentration* yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat. Selain itu, Rondenelli dalam Muluk (2009:6) juga mengungkapkan jenis desentralisasi menjadi luas, yaitu:

“*Deconcentration* (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah), *delegation* (perpindahan tanggungjawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung), *devolution* (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada diluar kontrol pemerintah pusat) dan *privatization* (memberikan semua tanggungjawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah)”.

Rondenelli dalam Hanafi dan Laksono (2009:1) juga mengatakan bahwa desentralisasi dalam arti luas meliputi setiap penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat baik kepada pemerintahan daerah maupun pejabat pemerintahan pusat yang ditugaskan ke daerah. Tujuan adanya asas desentralisasi menurut Hanafi dan Laksono (2009:2) untuk menyalurkan aspirasi politik daerah untuk mewujudkan stabilitas politik dan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Syafiie

(2002:110) tujuan desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di atasnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan menjalankan urusan daerah dengan melakukan pembangunan di segala bidang, salah satunya pada bidang kepariwisataan. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar melaksanakan kewenangan dalam hal pembangunan pariwisata, yakni pada kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wujud dari peran pemerintah daerah dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

D. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi selain menjadi kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu

“*participation*” berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Selanjutnya menurut Soetrisno (1995:207) yang menyebutkan partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya program bantuan dari pemerintah, dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri yang dimulai dari pada saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta hingga perawatan suatu program.

Mubyarto dalam Huraerah (2008:96) juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses penyusunan program, perencanaan pembangunan, serta perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya Conyers (1991:154-155) juga mengungkapkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan alat, guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat apabila tanpa ada program pembangunan serta apabila proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek.
- c. Partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan daerah mereka sendiri.

Sebagai tujuan yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi masyarakat yakni untuk meningkatkan kemampuan atau pemberdayaan setiap orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program

pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan, yang terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Seperti pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, masyarakat ikut berpartisipasi langsung yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut.

2. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya memiliki pengelompokan berdasarkan pada pihak-pihak yang melaksanakan, jenis kegiatan yang dilakukan dan tujuan partisipasi. Hal ini dikaitkan dengan praktek pembangunan masyarakat yang demokratis harus sesuai dengan konsep partisipasi, menurut Gaventa dan Valderma dalam Huraerah (2008:99) ada 3 (tiga) konsep partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi politik yaitu representasi dalam demokrasi. Mempengaruhi dan mendudukan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan, dengan tidak melibatkan langsung masyarakat dalam proses pemerintahan.
- b. Partisipasi sosial yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai “*beneficiary*” pembangunan dalam pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proses pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan

sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi diletakan diluar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.

- c. Partisipasi warga yaitu pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima atau objek, tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan pengelompokan partisipasi tersebut, diharapkan dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran harus sesuai dengan pihak yang terlibat, jenis kegiatan yang dilakukan dan tujuan partisipasi. Sehingga setiap *stakeholder* mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam bekerjasama. Hal ini tentunya akan mempermudah kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan dari pembangunan.

3. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sendiri memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda, tergantung dari kegiatan yang dilakukan dan siapa pelakunya. Menurut Sulaiman dalam Huraerah (2008:103) membagi bentuk-bentuk partisipasi mejandi 5 (lima) macam, yakni:

- a. Partisipasi langsung, kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi bentuk iuran uang atau barang, kegiatan partisipatori, dana, sarana yang datang dari masyarakat. Apabila terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi *representative* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sedangkan jenis-jenis partisipasi juga berbeda-beda, seperti yang telah dikemukakan oleh Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2008:102-103) yakni:

- a. Partisipasi pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjangsana, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, dan pertolongan bagi orang lain.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam bentuk materiil.
- d. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri..
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan sebagai tanda keguyuban. Misalnya turut arisan, koperasi, layat (peristiwa kematian), kondangan (peristiwa pernikahan), nyambungan dan mulung sambung.

Partisipasi bisa dibangun melalui cara memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan dan memberikan pendidikan secara terus menerus untuk menanamkan kesadaran akan perlunya pembangunan. Masyarakat harus diberi kebebasan dan tanpa ada tekanan serta paksaan untuk ikut ambil bagian dalam proses pembangunan (Huraerah 2008:104). Jadi partisipasi masyarakat banyak bentuk dan jenisnya yang dapat diberikan oleh partisipan guna ikut serta dalam melakukan pembangunan. Seperti halnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Dimana masyarakat memberikan jenis dan bentuk partisipasinya yang berbeda-beda dalam proses pembangunan guna memenuhi pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan bersama.

4. Faktor Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan. Sifat dari faktor-faktor partisipasi masyarakat dapat mendukung suatu keberhasilan program, namun ada juga yang sifatnya menghambat keberhasilan program. Ndraha (1990:22) mengatakan partisipasi

yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi:

- a. Usia: faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas ketertarikan kepada moral, nilai dan norma cenderung lebih banyak yang berpartisipasi, dari pada yang kelompok usia lainnya.
- b. Jenis kelamin: nilai yang lama dominan dalam kultur, berbagai bangsa mengatakan pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” berarti dalam banyak masyarakat peran perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama peran perempuan telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
- c. Pendidikan: dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat.
- d. Pekerjaan dan penghasilan: hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Artinya bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukaung oleh sarana yang mapan secara perekonomian.

- e. Lamanya tinggal: lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Berdasarkan dengan adanya faktor-faktor tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dapat mendukung keberhasilan program pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran yang maksimal guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan dapat tercapai.

E. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Sumarto (2009:16) mengungkapkan bahwa kemitraan sebagai hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian. Disisi lain kemitraan juga dapat disebut dengan istilah kerjasama. Menurut Ramses dan Bowo dalam Domai (2011:37) mengungkapkan bahwa kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini terkandung 3 (tiga) unsur pokok pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

Sulistiyani (2004:93) juga berpendapat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, negara hendaknya mampu mendekatkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Inilah yang menjadi bukti bahwa proses kemitraan adalah sesuatu yang perlu dilakukan dalam suatu negara. Dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan muncul rasa saling membutuhkan demi tercapainya tujuan bersama dalam bernegara. Kemitraan dapat tercipta jika memenuhi beberapa persyaratan, menurut Domai (2010:83) kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan yakni: a) ada dua belah pihak atau lebih; b) memiliki kerjasama visi dalam mencapai suatu tujuan; c) adanya kesepakatan; dan d) saling membutuhkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan akan terjadi jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Unsur dua belah pihak atau lebih, menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan-kepentingan satu sama lain yang saling mempengaruhi dan saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan bersama. Apabila dari hubungan tersebut tidak memenuhi kepentingan dari masing-masing pihak, maka hubungan tersebut tidak dapat dikatakan kerjasama, karena interaksi yang dapat dikatakan sebagai suatu kerjasama adalah interaksi yang saling mempengaruhi, yang mana posisi dari masing-masing pihak seimbang, serasi dan selaras bagi semua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Tentunya ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Salah satunya kemitraan dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang

kawasan wisata candi penataran, apabila dilakukan pengembangan dan pengelolaan yang baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan bersama.

2. Prinsip Kemitraan

Prinsip dalam kemitraan adalah sesuatu yang menjadi syarat terbentuknya kemitraan tersebut. Menurut Domai (2010:83) kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan, yakni adanya dua belah pihak atau lebih, memiliki kerjasama visi dalam mencapai suatu tujuan, adanya kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Sehingga kemitraan hanya akan terjadi jika telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tersebut. Itulah mengapa bahwa suatu kemitraan memang perlu adanya rasa saling membutuhkan, karena tidak menutup kemungkinan antar *stakeholder* tersebut terdapat adanya ketergantungan, tentunya ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan yang bersifat positif dan tidak melampaui batas.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004:95) bahwa prinsip-prinsip kemitraan diantaranya adalah:

- a. Kesamaan visi-misi, kemitraan dibangun atas kesamaan visi dan misi serta tujuan bersama. Kesamaan visi dan misi dapat menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Ada dua atau lebih pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.
- b. Kepercayaan, setelah ada kesamaan visi dan misi, maka prinsip berikutnya dalam suatu kemitraan adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh sebab itu, kepercayaan adalah modal

dasar membangun suatu kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi dengan niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.

- c. Saling menguntungkan, asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dan tidak kalah penting dalam membangun suatu kemitraan. Jika dalam bermitra salah satu pihak merasa dirugikan, merasa tidak mendapatkan manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bermitra. Sehingga antar pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan semuanya pihak merasa diuntungkan.
- d. Efisiensi dan efektifitas, dengan sinergi beberapa pihak untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kemitraan tersebut melibatkan mitra kerja. Sehingga dengan kemitraan akan tercapai kesepakatan tentang siapa melakukan apa, sehingga tujuan yang dicapai akan lebih efektif.
- e. Komunikasi timbal balik, komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondasi dalam membangun kemitraan. Tanpa komunikasi yang timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.

- f. Komitmen yang kuat, kerjasama akan kuat dan permanen jika ada komitmen antar pihak yang bermitra terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dalam mewujudkan kemitraan yang baik dan demi terlaksananya proses pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka prinsip-prinsip kemitraan tersebut diterapkan dalam proses kemitraan pembangunan dan penegelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Dengan begitu kemitraan akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Tujuan Kemitraan

Hafsah (2000:63) mengatakan pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah *win-win solution partnership*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar menawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik adalah bukan sebagai buruh dan majikan atau bawahan dan atasan. Kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara konkret menurut Hafsah (2000:63) adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- e. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Selain tujuan-tujuan tersebut, masih banyak tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan dan tujuan bersama dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kemampuan yang saling mempengaruhi dan dibutuhkan guna mewujudkan tujuan bersama.

4. Bentuk Kemitraan

Kemitraan memiliki komponen penting dalam menjalin suatu kerjasama yaitu ada pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemitraan merupakan upaya bersama dan memiliki nilai untuk sebuah tujuan bersama, karena dalam konteks *governance*, kemitraan dianggap penting dan memiliki andil yang cukup besar. Menurut Farazmand yang dikutip oleh Domai (2010:84) kemitraan (*partnership*) dianggap penting karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. *Partnership* menghasilkan kreativitas, inovasi, sinergi, kemampuan kuat untuk mengatasi masalah besar partisipasi dan tanggungjawab.
- b. *Partnership* dirasa penting karena meningkatkan keterkaitan dan keterhubungan antar orang, negara-bangsa, budaya, pemerintah dan organisasi sipil non-pemerintah.
- c. *Partnership* mendukung keterlibatan, kualitas *governance* positif, pemberian layanan, administrasi, dukungan politik dan stabilitas antar pemerintah, rakyat, sektor privat dan NGO.

Menurut Farazmand yang dikutip oleh Domai (2010:89), mengungkapkan bahwa *partnership* memiliki bentuk dan level diantaranya:

- a. Level global, level ini memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti persoalan lingkungan, migrasi, bencana alam, pengungsi, perang

dan masalah lainnya yang saling mempengaruhi. Sehingga perlu adanya *partnership* secara global bagi suatu negara untuk mengatasi persoalan.

- b. Level nasional, level ini kemitraan dapat dibangun oleh pemerintah nasional, NGO, masyarakat sipil, *stakeholder* dan sektor *privat*. Bentuk kemitraan yang terbentuk dari model ini berasal dari lembaga dalam negeri, sehingga aktornya dapat dari pemerintahan, swasta, masyarakat ataupun organisasi non-pemerintah lainnya.
- c. Level lokal, pada pemerintahan lokal merupakan pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. Biasanya pemerintah lokal memiliki akses terdekat dengan masyarakat. Sehingga mudah bagi mereka untuk mengerti dan memenuhi kebutuhan masyarakat. *Partnership* lokal sangat penting bagi suatu negara, karena kemitraan ini digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah global.

Sedangkan Sulistyani dalam Domai (2010:97) juga mengatakan bahwa model kemitraan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kemitraan semu, yaitu kemitraan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, namun sesungguhnya mereka tidak melakukan bekerjasama secara seimbang satu sama lainnya. Karena pihak yang melakukan kemitraan belum memahami tujuan dan manfaat yang ada dalam kemitraan tersebut.
- b. Kemitraan mutualistik, yaitu kemitraan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, dimana dalam kemitraan tersebut pihak yang melakukan kemitraan memahami aspek penting dalam melakukan kemitraan. Sehingga pihak-pihak yang bekerjasama tersebut saling memberi manfaat satu sama lain, dan tujuan dapat tercapai secara maksimal.
- c. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, yaitu suatu kemitraan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dari masing-masing pihak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk kemitraan harus sesuai dengan kondisi dan aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kemitraan tersebut. Seperti pada kemitraan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran yang memberikan peluang bagi banyak pihak yang ingin ikut berpartisipasi demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terselenggaranya kemitraan dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

F. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 disebutkan pula bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengertian pariwisata menurut Suwantoro (2004:3) mengatakan bahwa pariwisata adalah suatu proses berpergian sementara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena

kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lainnya untuk menambah pengalaman atau untuk belajar. Sedangkan menurut Wahab (1997:55) mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Aktivitas pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi suatu daerah bahkan suatu negara karena dengan sektor pariwisata dapat memberikan dampak besar dalam hal penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan pendapatan pada umumnya yang dihasilkan melalui pariwisata. Seperti berkembangnya sektor pariwisata kolam renang kawasan wisata candi penataran, sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian serta dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

2. Bentuk dan Jenis Pariwisata

Bentuk-bentuk pariwisata menurut Pendit (2004:34) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Menurut asal wisatawan. Apabila wisatawan berasal dari dalam negeri mengadakan perjalanan, maka dinamakan pariwisata domestik. Sedangkan wisatawan yang datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.
- b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran. Kedatangan wisatawan dari luar negeri memberikan pemasukan valuta asing yang memberi efek positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi wisatawan ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seseorang warga negara ke luar negeri memberikan efek negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri di negaranya. Ini dinamakan pariwisata pasif.

- c. Menurut jangka waktu. Kedatangan seseorang wisatawan disuatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya tinggal di tempat tujuan. Hal ini menimbulkan istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang.
- d. Menurut jumlah wisatawan. Diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, wisatawan datang sendiri atau dalam suatu rombongan. Maka timbul istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.
- e. Menurut alat angkut yang digunakan. Dilihat dari alat angkut yang digunakan wisatawan, maka dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata darat dan pariwisata laut, tergantung kendaraan yang digunakan wisatawan.

Sedangkan jenis-jenis pariwisata menurut Pendit (2004:36) dapat dibedakan sebagai berikut ini:

- a. Wisata budaya, yaitu merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mempelajari keadaan rakyat, adat istiadat, tata cara kehidupan, budaya dan seni yang ada di daerah yang dikunjungi.
- b. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan wisata dengan tujuan beristirahat guna memulihkan kesehatan jasmani maupun rohani.
- c. Wisata olahraga, yaitu perjalanan pariwisata dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif di dalam pesta olahraga disuatu tempat pariwisata.
- d. Wisata komersial, termasuk jenis perjalanan wisata untuk mengunjungi pameran atau pekan raya yang bersifat komersial.
- e. Wisata industri, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh kelompok pelajar ke suatu industri yang bertujuan guna meninjau atau meneliti industri yang dikunjungi.
- f. Wisata sosial, suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan wisata.
- g. Wisata pertanian, perjalanan wisata yang dilakukan mengunjungi proyek-proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan yang bertujuan untuk meninjau dan penelitian.
- h. Wisata bahari, wisata yang dikaitkan dengan kegiatan di air.
- i. Wisata cagar alam, yaitu perjalanan wisata ke tempat cagar alam dan taman lindung yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
- j. Wisata pilgrim, perjalanan wisata yang bertujuan untuk mendalami agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan dalam masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan perlu dibedakan bentuk dan jenisnya antara pariwisata yang satu dengan pariwisata yang lainnya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menentukan kebijaksanaan apa yang perlu untuk

mendukung pembangunan pariwisata yang ada. Hal ini juga berlaku pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, sehingga jenis dan macam pariwisata yang perlu dikembangkan kedepannya dapat terwujud seperti yang diharapkan dari tujuan awalnya.

3. Potensi Pariwisata

Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi adalah kesanggupan, daya dan kemampuan untuk lebih berkembang. Selanjutnya potensi wisata menurut Pendit (2004:117) menyebutkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Jenis potensi pariwisata dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Potensi Budaya merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat daerah, seperti adat istiadat, mata pencarian, kesenian dan kebudayaan daerah.
- b. Potensi Alamiah merupakan potensi yang ada di masyarakat, yang berupa potensi fisik dan geografi seperti alam.

Jadi, potensi wisata adalah segala hal dan keadaan baik dan nyata yang dapat diraba maupun yang tidak teraba, yang digarap, diatur dan disediakan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat dan dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai kemampuan, faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan bagi usaha dan mengembangkan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa-jasa. Potensi yang ada di kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat diwujudkan sebagai usaha kepariwisataan yang dimanfaatkan untuk memenuhi pelayanan publik dan kesejahteraan bersama.

4. Destinasi Pariwisata

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan. Suatu tempat pasti memiliki batas-batas tertentu, baik secara aktual maupun hukum. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Menurut Kusudianto dalam Pitana (2009:126) destinasi pariwisata dapat digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai dan hutan.
- b. Destinasi sumber daya budaya, seperti sejarah, museum, teater dan masyarakat lokal.
- c. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan.
- d. *Event* seperti, pesta kesenian di Bali, pesta danau Toba, pasar malam, dll.
- e. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia, wisata belanja di Hongkong, dll.
- f. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis dan keterpencilan, dll.

Daerah tujuan wisata yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia memiliki daya teris tersendiri. Salah satunya destinasi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, salah satunya kolam renang kawasan wisata candi penataran yang terus dilakukan pembangunan dan pengelolaannya agar lebih memiliki daya tarik dan patut untuk dikunjungi. Sehingga dapat mendorong tercapainya kepariwisataan yang maksimal dan terwujudnya pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

5. Wisatawan

Dalam kegiatan kepariwisataan keberadaan wisatawan tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini disebabkan karena wisatawan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kegiatan usaha kepariwisataan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pengembangan pariwisata disuatu daerah sangat tergantung dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek pariwisata. Menurut *of Internatinol Uniom Travel Organization* dalam Yoeti (1994:123) mengungkapkan bahwa:

“Wisatawan adalah orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dan berdiam di tempat tersebut lebih dari 24 jam, dengan tujuan sebagai berikut: pertama, untuk menggunakan waktu senggang baik untuk rekreasi atau berlibur, untuk keperluan kesehatan, pelajaran dan pengetahuan serta untuk menjalani ibadah. Kedua, untuk keperluan usaha, kunjungan keluarga dan menjalankan tugas-tugas serta konfrensi”.

Sementara itu G. A. Scmoll dalam Yoeti (1994:122) juga berpendapat bahwa wisatawan adalah individu atau kelompok individu yang mempertimbangkan dan merencanakan tenaga yang dimilikinya untuk perjalanan rekreasi dan berlibur, baik tertarik pada perjalanan yang pernah dilakukan, menambah pengetahuan, tertarik pada pelayanan yang diberikan oleh suatu daerah

tujuan wisata. Dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah telah menentukan batasan wisatawan, seperti yang telah dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 dalam Spillane (1993:21) yang mendefinisikan wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. Berdasarkan pengertian tersebut yang bisa dikatakan sebagai wisatawan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan perjalanan bersifat sementara waktu dan berkisar waktu kurang atau lebih dari 24 jam.
- b. Orang yang melakukan perjalanan itu dengan rasa suka rela dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
- c. Orang yang melakukan perjalanan itu tidak mampu untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya.

Dengan kata lain apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka orang tersebut belum dapat dikatakan sebagai wisatawan. Pada dasarnya motivasi seseorang untuk melakukan perjalanan kesuatu tempat akan menimbulkan kebutuhan yang harus dipertimbangkan, antara daya tarik obyek pariwisata dan fasilitas sarana dan prasarana. Wisatawan yang berkunjung ke kolam renang kawasan wisata candi penataran tentunya ingin menikmati pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran guna mewujudkan kebutuhan wisatawan.

G. Sarana dan Prasarana Pariwisata

1. Sarana Pariwisata

Menurut Karyono (1997:75) berpendapat bahwa sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung ataupun tidak langsung dan kehidupannya banyak tergantung pada jumlah kedatangan wisatawan yang berkunjung. Sarana pariwisata menurut Karyono (1997:75) adalah sebagai berikut:

- a. Sarana pokok kepariwisataan, adalah suatu perusahaan atau organisasi yang kehidupannya bergantung pada arus dari kedatangan orang-orang yang mendatangi untuk melakukan sebuah perjalanan untuk melakukan kegiatan pariwisata dengan mendatangi *agent travel*, hotel, dll.
- b. Sarana pelengkap kepariwisataan, adalah suatu perusahaan yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya untuk melengkapi sarana pokok kepariwisataan yang bertujuan untuk membuat wisatawan yang datang untuk berkunjung agar lebih lama tinggal, misalnya fasilitas kolam renang, olahraga, tempat ibadah, gazebo, tempat bermain anak, dll.
- c. Sarana penunjang kepariwisataan, adalah suatu perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan juga sarana pokok atau utama dan memiliki fungsi utama agar para wisatawan yang sedang berkunjung bisa lebih banyak mengeluarkan uangnya, misalnya melakukan kegiatan casino, karaoke, dan kegiatan positif lainnya.

Sarana kepariwisataan yang tersedia pada wisata kolam renang sebagai pelayanan publik yang diberikan kepada wisatawan terus dilakukan pembangunan dan pengelolaannya. Pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama dalam penyediaan sarana kepariwisataan yang memadai sebagai bentuk dalam memberikan pelayanan maksimal kepada wisatawan yang berkunjung ke kolam renang kawasan wisata candi penataran. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga semakin banyaknya wisatawan maka

semakin berhasil pembangunan yang telah dilaksanakan, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Prasarana Pariwisata

Menurut pendapat Karyono (1997:74) prasarana pariwisata merupakan sebuah fasilitas yang membuat proses roda ekonomi khususnya di dalam sektor pariwisata menjadi lancar, sehingga menjadikan manusia lebih mudah di dalam melaksanakan kegiatan hidupnya. Pengelolaan sarana dan juga perbaikan prasarana dalam strategi penggalan potensi pada sektor pariwisata sangatlah berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu obyek wisata. Apabila prasarana seperti halnya rambu-rambu arah petunjuk untuk mencapai destinasi wisata, itu akan berdampak pada meningkatnya minat wisatawan.

Prasarana kepariwisataan yang tersedia pada kolam renang kawasan wisata candi penataran yang diberikan sebagai pelayanan publik mempengaruhi terhadap kepuasan wisatawan. Pembangunan dan pengelolaan dalam penyediaan prasarana pariwisata terus dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang prima, guna meningkatkan jumlah wisatawan. Sehingga tujuan dari pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat tercapai, yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian bersifat kontekstual berusaha menekankan pada pemakaian dari suatu fenomena yang secara spesifik berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mengartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh sebab itu, penekanan unsur manusia sebagai instrumen penelitian menjadi sangat penting, peneliti ingin memberikan gambaran yang secara mendalam mengenai proses dan makna dari kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan masyarakat sekitar).

Menurut permasalahan yang diangkat, peneliti berusaha untuk mengetahui secara mendalam, menganalisis dan mendeskripsikan eksistensi kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Menurut Verdenberg dalam Alwasilah (2002:148) memiliki beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistik) dalam menganalisa suatu fenomena. Kedua, penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha

mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek yang berarti bahwa data yang dikumpulkan, dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi.

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa *rill* yang terjadi di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari penelitian ini yakni nilai yang belum terungkap dibalik pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran sampai merujuk kepada kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu instrumen yang penting dalam sebuah penelitian, karena fokus penelitian digunakan untuk membatasi pelaksanaan penelitian. Baik pembatasan dalam satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar obyek yang akan diteliti terfokus dan tidak melebar. Sehingga pelaksanaan penelitian dapat lebih terarah dan terhindar dari data-data yang tidak relevan serta tidak dibutuhkan terhadap tujuan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Herdiansyah (2011:207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih dikarenakan pada seberapa besar kepentingan dan rencana permasalahan yang akan dipecahkan, serta tenaga, dana dan waktu yang terbatas. Apabila tidak dibatasi kemungkinan akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, fokus penelitian sangat penting untuk

dijadikan sebagai sarana untuk membantu dan mengarahkan jalannya penelitian. Sehingga untuk membatasi ruang gerak penelitian agar terdapat batasan-batasan mengenai data mana yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
 - a. Peran pemerintah daerah.
 - b. Peran masyarakat.
 - c. Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
 - a. Faktor pendukung.
 - b. Faktor penghambat.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang melaksanakan salah satunya urusan daerah, yakni bidang kepariwisataan. Selain itu, peneliti juga memilih masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran untuk menjadi situs dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini berjudul kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan masyarakat menjalin kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Sehingga peneliti memilih kedua situs penelitian tersebut sebagai objek penelitian, yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dari judul tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Keberadaan data adalah untuk dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok kajian. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atau analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap objek atau sasaran penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh peneliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber sebagai informan

yang mengetahui mengenai pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Adapun yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.
- b. Ibu Vivien Widhianawati selaku Kasi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.
- c. Ibu Surep dan Bapak Yanto selaku masyarakat/pedagang pada kolam renang kawasan wisata candi penataran.
- d. Ibu Siti dan Ibu Anik selaku masyarakat/pengunjung pada kolam renang kawasan wisata candi penataran.

2. Data sekunder.

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam arti lain tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yang melalui dokumen, arsip, laporan, catatan dan lain lain yang memuat informasi atau data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

- d. Data pengunjung destinasi pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2014-2016.
- e. Data pegawai atau daftar hadir karyawan karyawan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto dalam Hasan (2002:76) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri (*human instrument*), sebagai instrumen kunci dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data di lapangan, terutama dalam proses wawancara.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), instrumen ini merupakan pedoman yang digunakan untuk mengarahkan dan membatasi peneliti dalam melakukan wawancara langsung kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan wawancara, agar saat wawancara berlangsung dengan informan sudah mempunyai daftar pertanyaan dan dapat memperdalam data atau informasi. Pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara dalam penelitian ini terlampir pada lampiran 4 dan 5.
3. Catatan lapangan (*field note*), *voice recorder* dan foto dengan menggunakan *handphone* serta alat tulis. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan

catatan lapangan untuk mencatat fenomena dari objek yang diteliti, kemudian fenomena tersebut bisa direkam menggunakan *voice recorder* dan atau dengan mengambil foto menggunakan *handphone* sebagai penunjang dan penguat dalam pengumpulan data informasi terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data yang valid dan relevan. Menurut Arikunto (2006:135) teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung bertanya kepada responden yang berkompeten di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Narasumber terdiri dari Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, Ibu Vivien Widhianawati selaku Kasi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata. Serta wawancara kepada pihak dari masyarakat yakni, Ibu Surep dan Bapak Yanto selaku masyarakat/pedagang pada kolam renang kawasan wisata candi penataran, serta Ibu Siti dan Ibu Anik selaku masyarakat/pengunjung pada kolam renang kawasan wisata candi penataran. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya terkait dengan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

2. Observasi.

Peristiwa atau fenomena di lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui teknik observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi lingkungan objek yang diteliti guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan aktual. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa observasi, seperti mengamati secara langsung terhadap kegiatan para pelaku pariwisata pada kolam renang kawasan wisata candi penataran.

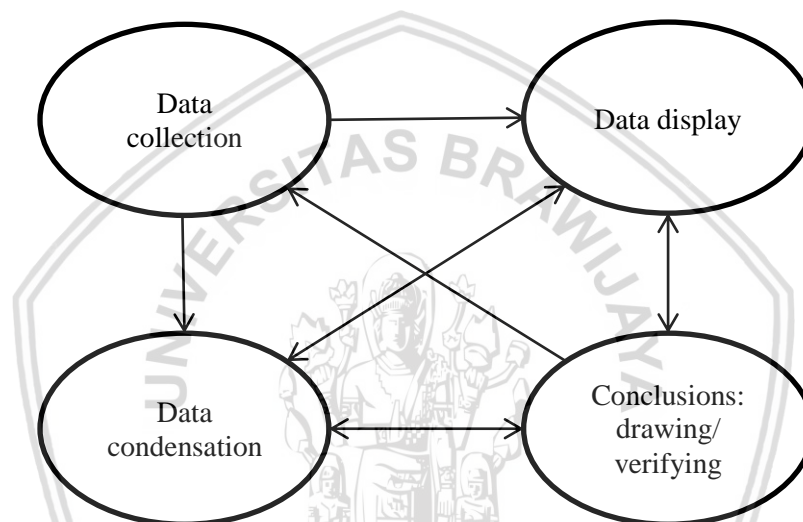
3. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, arsip, laporan atau dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi penunjang penulisan skripsi untuk dijadikan lampiran maupun pendukung penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, yakni data pegawai atau daftar hadir karyawan karyawan dan data pengunjung destinasi.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan rancangan data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana untuk menganalisis data dari hasil penelitian. Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Ketiga alur kegiatan tersebut digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi pada kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Berikut ini gambar dari model data interaktif beserta penjelasannya mengenai 3 (tiga) alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana:



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014: 33).

Berdasarkan gambar 2 komponen-komponen analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data condensation* (kondensasi data).

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan dan atau mengubah data yang mendekati keseluruhan bagian catatan lapangan, wawancara, dokumen empiris lainnya yang diperoleh peneliti selama melakukan pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data peneliti memperoleh data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar serta dari masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data-data tersebut kemudian dimasukan dalam proses tahap kondensasi data yang kemudian akan ditampilkan pada tahap penyajian data. Dimana peneliti mengkategorikan data sesuai dengan fokus penelitian untuk dimasukan dalam setiap indikato pada masing-masing fokus penelitian.

2. *Data display* (penyajian data).

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian dan penyatuan dari informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari sebuah penelitian. Selanjutnya agar laporan penelitian dapat dipahami dan diterima oleh berbagai pihak, maka pada tahap ini peneliti menyajikan data wawancara, observasi dan gambar yang sesuai dengan kriteria dan format masing-masing yang telah ditentukan pada tahap kondensasi data yang kemudian disajikan dan dianalisis. Hal ini bertujuan agar fenomena yang terjadi menjadi lebih mudah untuk dipahami.

3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi, dari data-data yang telah diperoleh lalu dianalisis, peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang telah dianalisis. Kemudian setelah peneliti memahami makna yang ada di dalam permasalahan, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data,

seperti hasil wawancara, observasi dan gambar yang dikorelasikan dengan teori yang digunakan. Hasil dari kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar



Gambar 3. Peta Kabupaten Blitar

Sumber: blitarkab.go.id.

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur secara geografis berada di barat daya Ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya dengan jarak ± 160 km. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Malang. |
| Sebelah Selatan | : Samudera Indonesia. |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri. |

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km² dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan, dll. Kabupaten Blitar juga dibelah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar utara dan Blitar selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adi luhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi "*point of essential*" terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

b. Kondisi Demografi dan Luas Wilayah

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, sebaliknya jadi masalah apabila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2014

mencapai 1.140.793 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 571.303 jiwa dan perempuan sebanyak 569.490 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 718 jiwa/km². Penyebaran penduduk di Kabupaten Blitar tahun 2014 pada masing-masing kecamatan:

Tabel 2. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan pada Tahun 2014.

Kecamatan <i>Districts</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (Km ²)	Jumlah Penduduk <i>Population</i> (Jiwa)	Kepadatan <i>Density</i> (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
010. Bakung	111,24	25 463	229
020. Wonotirto	164,54	35 552	216
030. Panggungrejo	119,04	41 215	346
040. Wates	68,76	28 141	409
050. Binangun	76,79	42 733	556
060. Sutojayan	44,20	47 670	1 079
070. Kademangan	105,28	64 960	617
080. Kanigoro	55,55	76 108	1 370
090. Talun	49,78	60 427	1 214
100. Selopuro	39,29	39 759	1 012
110. Kesamben	56,96	48 444	850
120. Selorejo	52,23	34 924	669
130. Doko	70,95	37 747	532
140. Wlingi	66,36	50 168	756
150. Gandusari	88,23	66 516	754
160. Garum	54,56	64 337	1 179
170. Nglegok	92,56	69 385	750
180. Sanankulon	33,33	55 242	1 657
190. Ponggok	103,83	100 303	966
200. Srengat	53,98	64 441	1 194
210. Wonodadi	40,35	46 744	1 158
220. Udanawu	40,98	40 514	989
Kabupaten Blitar <i>Blitar Regency</i>	1 588,79	1 140 793	718

Sumber: blitarkab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yakni sebanyak 100.303 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung yakni sebesar 25.463 jiwa. Namun apabila jumlah penduduk

dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka Kecamatan Sanankulon memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, yakni sebesar 1.657 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Wonotirto, yakni sebesar 216 jiwa/km².

c. Visi dan Misi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Pemerintahan Kabupaten Blitar dibawah kepemimpinan Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo, S.Sos selama periode tahun 2016-2021 menetapkan visi dan misi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Visi Kabupaten Blitar “Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing”. Selengkapnya penjabaran visi sebagai berikut:
 - a) Lebih sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman, dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - b) Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.

- c) Berdaya saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi Kabupaten Blitar tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

2. Misi Kabupaten Blitar:

- a) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan, dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.
- b) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.
- c) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti dan praktek keagamaan) dan kesehatan, serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
- d) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- e) Meningkatkan berdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan

keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata, serta pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

- f) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

a. Visi dan Misi

1. Visi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga “Terwujudnya masyarakat yang produktif, prestatif dan sejahtera melalui optimalisasi peran pemuda, keolahragaan, kebudayaan serta pendayagunaan obyek wisata yang handal”.
2. Misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga:
 - a) Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan program, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
 - b) Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
 - c) Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

Berdasarkan gambar 4 struktur organisasi dapat diketahui bahwa dalam struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
 - b) Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.
 - c) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - a) Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata.
 - b) Seksi Promosi Pariwisata.
 - c) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya dan Nilai Tradisi.
 - b) Seksi Kesenian.
 - c) Seksi Dokumentasi dan Sarana Prasarana Seni Budaya.
6. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - b) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan.
 - c) Seksi Keolahragaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing bidang. Secara terperinci tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda, dan bidang olahraga yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- b) Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- d) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan kerja dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan rencana kegiatan dan program kerja dinas.
- b) Memimpin pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas.
- d) Memimpin pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.

- e) Memimpin pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas.
 - f) Memimpin pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
 - g) Memimpin pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
 - h) Memimpin pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor.
 - i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.

- c) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- d) Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata.
- e) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- f) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- h) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
- i) Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan berprestasi dan berdedikasi.

- j) Melaksanakan administrasi Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas, bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- d) Melaksanakan kebijakan di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.

- e) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- f) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- g) Mengevaluasi dan melaporkan di bidang analisis data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
- h) Melaksanakan administrasi bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. Bidang Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas penyiapan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang museum, kepubakalaan, sejarah, cagar budaya dan nilai tradisi, kesenian, dokumentasi dan sarana prasarana seni budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang kebudayaan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun perumusan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b) Menyusun, mendata, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja bidang kebudayaan.
- c) Menyusun standar operasional prosedur dan kinerja di bidang kebudayaan.
- d) Memberikan rekomendasi pemberian ijin di bidang kebudayaan.

- e) Melaksanakan pembinaan dan pelestarian kebudayaan.
- f) Melaksanakan pembinaan ketahanan budaya daerah dan nasional.
- g) Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman museum, kepurbakalaan, cagar budaya dan tradisi budaya.
- h) Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang kebudayaan.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

6. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, yang meliputi pemberdayaan pemuda olahraga, pembinaan manajemen kelembagaan pemuda olahraga dan kerjasama kepemudaan dan keolahragaan. Untuk melaksanakan tugas, bidang kepemudaan dan keolahragaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan manajemen, kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan dan kerjasama lembaga kepemudaan keolahragaan serta prestasi di bidang pemuda olahraga.
- b) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, olahraga dan pembinaan manajemen, kelembagaan pemuda olahraga dan kerjasama lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang, maka setiap urusan ada yang menyelsaikannya. Sehingga setiap bidang harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang yang sedang dalam proses pembangunan, yakni bidang pariwisata. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar kini sedang berkembang, banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melakukan pembangunan sektor pariwisata dengan melibatkan pihak-pihak yang mendukung berkembangnya kepariwistaan. Mewujudkan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Blitar memerlukan peranan dari seluruh *stakeholders*, yakni pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Ketiga *stakeholders* tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk terwujudnya pembangunan pariwisata yang maksimal, guna memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kemitraan dalam pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar bekerjasama dengan masyarakat. Salah satunya pariwisata yang sedang dalam pembangunan adalah kawasan wisata candi penataran. Kawasan wisata candi penataran yang di dalamnya terdapat banyak wisata yang bisa dikunjungi, seperti candi penataran, kolam renang, museum dan masih banyak lagi. Tetapi untuk candi penataran, pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengelola, karena candi penataran pengelolaannya dibawah kendali Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Hanya saja letak candi penataran berada di wilayah Kabupaten Blitar, jadi pemerintah daerah hanya ikut menjaga keberadaan candi penataran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Dari sisi peran dan fungsi wisata yang paling besar adalah kawasan wisata candi penataran, didalam kawasan tersebut ada candi penataran, kolam renang, museum, diorama, amphiteather, dsb. Memang yang paling banyak dikunjungi adalah candi penataran dan kolam renang sampai saat ini. Tetapi untuk candi penataran, dinas memang tidak mengelolanya. Candi penataran itu milik BPCB Trowulan, jadi kalau masalah candi penataran dibawah kendali BPCB Trowulan. Cuma letaknya candi di wilayah Kabupaten Blitar”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).



Gambar 5. Suasana dalam Kawasan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran tidak terlepas dari peran para *stakeholders* yang terlibat, semuanya memiliki peran masing-masing dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam rangka melaksanakan pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran beberapa pihak yang terlibat antara lain, yakni Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selaku utusan dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar dan masyarakat sekitar kolam renang kawasan candi penataran sebagai pelaku pariwisata. Keduanya memiliki peran masing-masing yang saling terkait dalam kemitraan yang terjalin guna melaksanakan pembangunan dan pengelolaan wisata.

a. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya, yang ditunjuk untuk menangani urusan kepariwisataan daerah. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan, salah satunya yakni pada kolam renang kawasan wisata candi penataran dilakukan dengan cara membangun, memelihara dan melakukan pemasaran wisata, serta mengadakan pembinaan kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Pengelolaan wisata dengan cara membangun, memelihara, melakukan pemasaran wisata, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan sdm. Pertama, membangun tentu dengan cara membangun infrastruktur kawasan wisata. Contoh tahun 2015 yang lalu, kami membangun bangunan induk kolam renang itu dalam rangka meningkatkan pelayanan sehingga pengunjung merasa nyaman dengan fasilitas yang ada. Tahun ini kami juga akan membangun tempat parkir yang luas, kamar mandi bilas, pagar dan fasilitas yang menunjang lainnya. Kedua, dengan cara memelihara fasilitas yang telah ada, yang rusak diperbaiki, dicat selanjutnya dilakukan perawatan. Ketiga, kami melakukan pemasaran pariwisata dengan memberikan fasilitas yang mendukung lainnya untuk menarik minat wisatawan. Selanjutnya, kami juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat sebagai pelaku wisata dalam rangka pembangunan, karena sdm juga harus dibangun dengan cara pembinaan dan ditingkatkan kesadarannya dengan cara menerapkan prinsip *sapta pesona*”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).



Gambar 6. Kolam Renang Anak-anak.

Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 7. Kolam Renang Arus.

Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 8. Kolam Renang Dewasa.

Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 9. Tempat Penitipan Barang, Penyewaan Ban Pelampung dan Baju Renang.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan dengan cara membangun dan memelihara fasilitas, melakukan pemasaran pariwisata agar wisatawan tertarik untuk berkunjung, serta melakukan pembinaan kepada pengelola wisata dan pelaku usaha wisata pada kolam renang kawasan wisata candi penataran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, maka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana juga harus terpenuhi. Tetapi untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di kolam renang kawasan wisata candi penataran yang diberikan pemerintah daerah dirasa belum mencukupi kebutuhan wisatawan. Oleh sebab itu, upaya pembangunan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Masuk kawasan wisata candi penataran ada beberapa fasilitas yang kami kelola agar bisa dinikmati sebagai pelayanan publik, ada tempat duduk, toilet, mushola dan kios makanan dan souvenir, fasilitas tersebut bisa dinikmati secara gratis. Namun apabila pengunjung masuk ke kolam renang, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp.3000,00- untuk anak-anak dan Rp.5000,00- untuk orang dewasa. Harga tiket yang harus dibayarkan tersebut menurut kami sangat murah, sehingga fasilitas yang kami berikan masih terbatas. Kami terus mengupayakan pembangunan agar fasilitas publik yang diinginkan pengunjung bisa terpenuhi”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).



Gambar 10. Karcis Parkir.
Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 11. Tiket Masuk Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran Anak-anak dan Dewasa.
Sumber: Dokumentasi penulis.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa fasilitas sarana dan prasarana di kolam renang kawasan wisata candi penataran yang dibutuhkan wisatawan sudah tersedia, tetapi masih terbatas. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya mencukupi dengan yang dibutuhkan wisatawan. Sehingga pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana agar wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Sarana dan prasarana menurut kami belum terpenuhi, makanya kami masih ingin terus melakukan pembangunan. Kami merasa bahwa sarana dan prasarana wisata di kolam renang masih kurang. Contoh tempat parkir yang tidak layak, kami merasa tempat parkir sekarang ini masih sempit, makanya kami ingin membangun tempat parkir yang lebih luas. Lalu kamar mandi bilas, kami merasa masih kurang. Jadi tahun ini kami membangun kamar mandi bilas lagi. Dan kami akan membuat juga studio mini, untuk melihat sejarah Kabupaten Blitar. Jadi semacam bioskop mini atau 3D seperti yang ada di Jatim park Batu”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).



Gambar 12. Tempat Parkir Motor dan Mobil.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Selanjutnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti selaku pengunjung kolam renang kawasan wisata camdi penataran, bahwa:

“Saya rasa fasilitasnya masih kurang, seperti kamar mandi bilas yang hanya ada satu tempat saja baik untuk laki-laki dan perempuan. Terlihat masih banyak antrean untuk menggunakan fasilitas ini”. (Wawancara tanggal 25 Mei 2017, pukul 15.00 WIB).



Gambar 13. Kamar Mandi Bilas Laki-laki dan Perempuan.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di kolam renang kawasan wisata candi penataran masih belum terpenuhi, seperti kurangnya tempat parkir, kamar mandi bilas, serta akan dibangun fasilitas penunjang lainnya. Sehingga pemerintah daerah terus membangun kolam renang kawasan wisata candi penataran, agar wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik dan jumlah wisatawan meningkat. Selain dengan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, peran pemerintah daerah juga melakukan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vivien Widhianawati selaku

Kasi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Selama ini yang sudah kami lakukan dengan menjaga kawasan wisata kolam renang, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, serta menambah wahana seperti adanya *water boom* dan air mnacur, berbagai macam ayunan, dan area bermain anak-anak lainnya. Selain itu juga memberikan area-area yang luas untuk pengunjung menikmati suasana dalam kawasan kolam renang, seperti adanya pujasera, tempat duduk, terus ada hiburan musik dan karaoke, serta akses wifi. Dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana seperti itu agar pengunjung tertarik dan merasa nyaman”. (Wawancara tanggal 10 Mei 2017, pukul 09.30 WIB).



Gambar 14. Wahana Waterboom dan Air Mancur.

Sumber: Dokumentasi penulis.





Gambar 15. Wahana Bermain Ayunan.

Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 16. Area Tempat Duduk.

Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 17. Pujasera dan Karaoke.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemasaran wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran dilakukan dengan cara menjaga kawasan wisata agar pengunjung merasa nyaman, serta menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. Pemerintah daerah berharap dengan memberikan fasilitas yang mendukung dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Sehingga jumlah wisatawan pada kolam renang kawasan wisata candi penataran meningkat.

Selain itu peran pemerintah daerah juga melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia. Pembinaan diberikan kepada masyarakat, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan diberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip sapta pesona. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Kami rutin datang ke destinasi wisata, memberikan pengarahan kepada pengelola dan pelaku pariwisata, misalnya bagaimana mengelola fasilitas, menjaga kebersihan dan menjaga keamanan. Kami melakukan sosialisasi tersebut kepada pelaku pariwisata, termasuk guide, yang punya warung makan, toko oleh-oleh dan souvenir, home stay, dll. Kami juga menanamkan pentingnya prinsip sapta pesona dalam usaha pariwisata. Jadi pembinaan dan sosialisasi itu selalu kami lakukan. Kami sering datang ke destinasi, karena dengan datang akan lebih mengetahui permasalahan seperti apa yang ada di lapangan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).



Gambar 18. Petugas Karcis Parkir dan Pedagang.

Sumber: Dokumentasi penulis.



Gambar 19. Loker Tiket dan Pintu Masuk.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah memberikan sosialisasi pembinaan kepada pengelola kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pembinaan dilakukan pemerintah daerah dengan cara datang langsung agar lebih mengetahui permasalahan di destinasi wisata. Sehingga pemerintah daerah akan lebih paham dan mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal, yang berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan.

Selain untuk meningkatkan jumlah wisatawan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

b. Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran, yakni ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaannya, serta dalam membuat kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Masyarakat kami libatkan dalam pengelolaan di destinasi wisata kolam renang penataran, misalkan petugas penarik portal retribusi, petugas karcis parkir, petugas tiket masuk destinasi, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Mereka semua dari kami untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Jadi mereka kami rekrut sebagai tenaga petugas kawasan kolam renang penataran, kami beri honor setiap bulan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat sekitar ikut serta dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Masyarakat sekitar diberikan lapangan pekerjaan sebagai petugas kawasan kolam renang dan diberi gaji setiap bulannya. Masyarakat sekitar sebagai pelaku pariwisata diberikan sosialisasi dan pembinaan tentang kepariwisataan secara langsung mengenai cara memberikan pelayanan yang baik

sesuai dengan konsep sapta pesona. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Kami sering adakan pembinaan kepada teman-teman pengelola wisata dan pelaku usaha wisata, disana ada petugas parkir, petugas loket, petugas kebersihan, petugas keamanan dan pedagang. Sumber daya pengelola dan pelaku usaha wisata hampir semua dari masyarakat sekitar. Mereka kami beri sosialisasi mengenai bagaimana mengelola wisata dengan baik guna meningkatkan jumlah wisatawan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah memberikan sosialisasi kepada pelaku wisata. Sumber pelaku usaha pariwisata sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran. Sehingga terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Surep selaku pedagang pada kolam renang kawasan wisata candi penataran, bahwa:

“Pedagang diijinkan jualan disini, kami tidak dimintai uang untuk pajak jualan, kami hanya diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan kawasan kolam renang. Kalau untuk modal kami pedagang dengan modal sendiri. Biasanya kami juga diberi tahu tentang bagaimana bekerja di lingkungan wisata kolam renang, menjaga lingkungan ini agar tetap nyaman ”. (Wawancara tanggal 25 Mei 2017, pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pedagang yang juga merupakan pelaku wisata diberikan izin untuk berjualan di kawasan wisata. Para pedagang tidak dipungut biaya atau pajak, mereka hanya diminta untuk ikut menjaga kebersihan. Selain itu, pedagang juga mendapatkan sosialisasi tentang usaha di lingkungan kolam renang kawasan wisata candi penataran.



Gambar 20. Pedagang.

Sumber: Dokumentasi penulis.

Selain itu, masyarakat sekitar yang berperan sebagai pelaku usaha pariwisata juga mendapatkan dampak yang positif dengan adanya wisata. Seperti yang diungkap oleh Bapak Yanto selaku pedagang pada wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran, bahwa:

“Saya dan teman-teman pedagang lainya merasa beruntung dengan adanya kolam renang ini. Kami bisa berjualan mencari rejeki disini. Kolam renang seetiap hari selalu ramai pengunjung, apalagi kalau hari libur biasanya banyak rombongan bus. Tentunya dengan semakin ramainya pengunjung hasil dari jualan saya juga semakin banyak”. (Wawancara tanggal 25 Mei 2017, pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa para pelaku usaha pariwisata merasakan dampak positif yang sangat besar. Para pelaku usaha merasa diuntungkan dengan adanya kolam renang kawasan wisata candi penataran, mereka dapat meningkatkan perekonomian dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Kedatangan wisatawan sangat penting bagi pelaku usaha, karena semakin banyak pengunjung maka semakin banyak pula penghasilan yang diperoleh oleh para pelaku usaha pariwisata.

Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Kerjasama antara kedua *stakeholders* dalam pembangunan harus terjalin dengan baik dan dapat bekerjasama secara profesional. Sehingga pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat terlaksana dengan baik, dan tujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

c. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pembangunan pariwisata tidak akan terlaksana jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran sampai saat ini telah terjalin kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, bantuan dana dan pelatihan. Sedangkan peran dari masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Pada suatu kemitraan terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kerjasama yang dilakukan dapat disebut sebagai kemitraan. Berikut ini syarat-syarat kemitraan yang harus terpenuhi:

1. Ada dua belah pihak atau lebih.

Dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, pihak yang berkerjasama adalah pemerintah daerah Kabupaten Blitar dan masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar menunjuk Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengurus segala urusan, salah satunya mengenai urusan kepariwisataan di Kabupaten Blitar. Peran dari pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator untuk terwujudnya kolam renang kawasan wisata candi penataran yang lebih baik. Bentuk dari bantuan pemerintah daerah adalah berupa dana anggaran dan juga pembinaan atau pelatihan. Selanjutnya peran dari masyarakat adalah sebagai pelaku pariwisata, yakni pengelola pariwisata sebagai petugas kawasan kolam renang kawasan wisata candi penataran yang menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta pelaku usaha lainnya, seperti pedagang makanan dan minuman, oleh-oleh, *souvenir*, dan lain sebagainya. Sedangkan kemitraan dengan pihak swasta sampai saat ini belum ada. Kedepan pemerintah daerah juga ingin menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau investor dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.

Dalam suatu kemitraan yang dilakukan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi kreatif. Seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Tentunya tujuan kami dari pembangunan kolam renang penataran untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini dilakukan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta dengan adanya pembinaan dan pelatihan secara teknis. Kami terus mendorong mereka untuk melakukan pembangunan wisata kolam renang penataran, agar wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Karena kalau wisatawan sudah datang ke destinasi wisata, pasti wisatawan akan menitipkan kendaraan, beli makanan dan minuman jadi otomatis ekonomi masyarakat akan meningkat. Itulah kelebihan dari pariwisata, kami terus memotivasi mereka untuk terus melakukan pembangunan agar lebih baik lagi pelayanan yang diberikan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembinaan kepada pengelola pariwisata dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Tujuan tersebut sesuai dengan visi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, yakni “Terwujudnya masyarakat yang produktif, prestatif dan sejahtera melalui optimalisasi peran pemuda, keolahragaan, kebudayaan serta pendayagunaan obyek wisata yang handal”. Serta Misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar:

- a) Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan program, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- b) Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

- c) Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, dan memasyarakat.
- d) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- e) Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata daerah.

Berdasarkan pada visi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, yakni “Terwujudnya masyarakat yang produktif, prestatif dan sejahtera melalui optimalisasi peran pemuda, keolahragaan, kebudayaan serta pendayagunaan obyek wisata yang handal” menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah ingin menggali kemampuan masyarakat guna kesejahteraan bersama. Masyarakat dilibatkan dengan diberikan pembinaan dan pelatihan dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, pada misi poin “e” yakni “Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata daerah” menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata, khususnya pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar.

3. Ada kesepakatan.

Kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat tidak ada kesepakatan yang resmi secara tertulis dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Seperti yang diungkapkan oleh

Ibu Vivien Widhianawati selaku Kasi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa, sebagai berikut:

“Kami dalam pembangunan kolam renang ini hanya bekerjasama dengan masyarakat, tidak dengan pihak swasta. Masyarakat sekitar wisata kami libatkan menjadi petugas kawasan, selain itu masyarakat kami berikan kesempatan untuk menjalankan usaha wisatanya. Seperti pedagang makanan dan minuman, serta oleh-oleh dan souvenir khas. Jadi kami tidak ada kesepakatan secara resmi, semacam MoU itu tidak ada. Selama ini kesepakatan yang kami lakukan dengan petung/musyawarah”. (Wawancara tanggal 10 Mei 2017, pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran baik dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat belum ada kesepakatan resmi yang secara tertulis. Selama ini para *stakeholders* mengambil kesepakatan dengan persetujuan secara lisan dan bermusyawarah.

4. Saling membutuhkan

Tujuan kemitraan tentu saja untuk saling melengkapi kekurangan dari pihak yang bekerjasama, sehingga menimbulkan rasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Kaitannya dengan kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana masing-masing pihak memiliki rasa saling membutuhkan. Pemerintah daerah sendiri tidak dapat melakukan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran secara langsung. Dengan kekurangan yang dimilikinya tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain, yakni masyarakat yang bertindak sebagai pelaku pariwisata.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, tentunya kedua belah pihak memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam kemitraan tersebut tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dan informasi yang diperoleh dari narasumber ditemukan adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh *stakeholders* dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

a. Faktor Pendukung

Kemitraan yang baik, tentunya kedua belah pihak saling mendukung dan bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apabila masing-masing pihak tidak saling mendukung satu sama lain, maka kerjasama tidak akan terjalin dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Faktor pendukung atas kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran antara lain:

1. Adanya rencana strategis (renstra).

Dengan adanya renstra maka akan memudahkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata, termasuk wisata kolam renang

kawasan wisata candi penataran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Faktor pendukungnya adalah renstra program kerja dinas menjadi pendukung kami untuk melakukan pembangunan. Program kerja itu setiap akhir tahun kami menyusun untuk tahun berikutnya. Contoh ini kami ingin membangun destinasi wisata di kawasan wisata penataran, ini kami sudah merancang sedemikian rupa sudah ada di program kerja dinas. Jadi program kerja itu setiap tahun ada, yang 5 tahunan juga ada yaitu ada di rencana strategis atau renstra. Renstra itu akan menyampaikan informasi kepada publik bahwa setiap tahunnya apa ingin kami lakukan, sudah tersusun rapi programnya”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa renstra menjadi alat atau pedoman yang memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dan pariwisata lainnya di Kabupaten Blitar. Rencana strategis yang telah disusun terdapat beberapa program kerja yang sudah terencana rinciannya. Sehingga dengan disusunnya program kerja tersebut tentu saja akan memudahkan pemerintah daerah dalam implementasinya, salah satunya pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Keadaan SDM yang dimiliki pemerintah daerah sudah mampu bekerja secara profesional, dan untuk pelaku wisata di lapangan harus terus mendapatkan bimbingan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“SDM yang ada di dinas kami rasa sudah cukup. Tetapi untuk pelaku di lapangan harus terus kami motivasi, terus ditingkatkan sdmnya, pemahamannya bagaimana menjadi pengusaha wisata sesuai dengan prinsip sapta pesona pariwisata. Mereka sebagian sudah bisa, tetapi masih banyak yang belum tau, makanya sdm harus terus ditingkatkan dengan kami lakukan pembinaan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa SDM pada pemerintah daerah sudah cukup mampu untuk menjalankan program kerja yang telah disusun, salah satunya yakni pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Sedangkan sumber daya manusia pada masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan masih harus terus ditingkatkan lagi dengan adanya bimbingan yang diberikan dari pihak pemerintah daerah.

3. Dukungan atau perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar.

Wujud dari dukungan pemerintah daerah Kabupaten Blitar terhadap pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dengan pemberian dana atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Pembangunan pariwisata di Kabupaten Blitar ini kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar sendiri. Tetunya berupa pendanaan. Dana yang diberikan berasal dari APBD Kabupaten Blitar. Dana tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan pariwisata, meskipun kadang dana yang kami usulkan tidak turun semua. Selain itu, tahun ini kami juga mendapat bantuan dana anggaran sebesar 1,8 Milyar untuk membangun sarana prasarana wisata khusus di kawasan wisata penataran saja, dana tersebut berasal dari kementerian pariwisata”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar memberikan dukungannya berupa pemberian dana APBD untuk keperluan pembangunan pariwisata, kolam renang kawasan wisata candi penataran salah satunya. Selain itu, juga mendapatkan bantuan dana dari kementrian pariwisata. Dana tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada pada kolam renang kawasan wisata candi penataran, guna memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan yang berkunjung.

4. Kesadaran masyarakat mulai muncul

Pada pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran tidak bisa dipungkiri bahwa memang harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan wisata. Hal ini karena masyarakat yang akan ikut serta berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang beraktifitas di lingkungan destinasi wisata sebagai pelaku dari wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Kesadaran teman-teman pariwisata sudah mulai muncul. Dilihat dari antusias mereka sangat besar untuk mengikuti sosialisasi, karena mereka merasa sosialisasi pembinaan itu penting. Bukan hanya untuk dinas tetapi juga mereka. Kami salut dengan antusias mereka, mereka haus akan pengetahuan dan informasi. Mereka terus belajar menjadi pelaku pariwisata yang baik itu seperti apa. Karena dengan begitu mereka dapat mengembangkan usaha pariwisatanya”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

5. Keadaan lokasi yang mendukung.

Letak kolam renang yang terletak di kawasan wisata candi penataran, dimana candi penataran merupakan candi terbesar di Provinsi Jawa Timur serta pada kawasan wisata candi penataran juga terdapat banyak obyek pariwisata lainnya. Pada kawasan wisata candi penataran yang menjadi *ikon* adalah candi penataran, jadi obyek wisata disekitar menjadi pendukung, namun pemerintah tidak memiliki atas pengelolaan candi penataran tersebut. Sehingga kolam renang yang dibawah kendali pemerintah daerah merasa diuntungkan dengan letaknya yang bersebelahan dengan lokasi candi penataran, karena sekalian sebagai sarana promosi keberadaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

6. Prasarana jalan akses menuju destinasi.

Pembangunan kepariwisataan tentunya diperlukan adanya prasarana insfrastrutur jalan sebagai faktor penunjang kegiatan kepariwisataan. Adanya prasarana jalan yang memedai akan memudahkan aksesibilitas menuju destinasi wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Letak kolam renang berada disekitar kawasan wisata candi penataran sehingga insfrastrutur jalan terus dibenahi, jalannya mulus kalau ada lobang sama dinas pu diperbaiki. Selain itu askesnya sangat mudah dan banyak rambu, dari arah kota tinggal lurus saja ke utara langsung masuk kawasan wisata candi penataran Sehingga wisatawan mudah dan nyaman dalam menempuh perjalanan menuju destinasi wisata kolam renang penataran”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa prasarana jalan untuk menuju wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran sudah bagus dan lancar. Lokasi dari kolam renang sangat mudah untuk diakses, karena terletak disekitar kawasan wisata candi penataran yang berada di Kabupaten Blitar sebelah utara yang hanya satu jalur saja untuk menuju destinasi wisata, sehingga memudahkan wisatawan yang akan berkunjung ke kolam renang kawasan wisata candi penataran.

b. Faktor Penghambat

Selain ada faktor pendukung dalam kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, ternyata juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran antara lain, yakni:

1. Minimnya pendanaan atau dana anggaran.

Upaya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran masih terdapat kendala, salah satunya masalah keterbatasan anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, bahwa:

“Faktor penghambatnya adalah anggaran, karena belum tentu program kerja yang telah kami susun, dapat anggaran dari pemerintah daerah yang sesuai dengan yang kami butuhkan. Misalnya kami ingin membangun yang membutuhkan dana senilai 1 M ternyata pemerintah daerah tidak mampu menyediakan dana sesuai dengan yang kami butuhkan, jadi mau tidak mau kami hanya bisa membangun sesuai dengan sejumlah dana yang diberikan. Karena pemerintah daerah yang diurusi itu banyak, jadi lebih mengutamakan bidang yang memang lebih membutuhkan. Program kerja dinas setiap tahunnya memang sudah disusun kami sudah tinggal menjalankan, tetapi anggaran yang kurang mendukung. Jadi kendalanya keterbatasan anggaran, apabila anggaran tercukupi maka pembangunan akan dilakukan secara menerus. Kalau ada anggaran berapapun habis, angan-angan kami ingin membangun itu banyak”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar berupa dana atau anggaran masih minim. Dana disesuaikan dengan skala prioritas yang diunggulkan, karena pemerintah daerah Kabupaten Blitar merasa masih banyak urusan selain pembangunan kepariwisataan yang perlu mendapat perhatian juga. Dana anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan, karena anggaran merupakan hal penting untuk menentukan terselenggaranya program kegiatan. Apabila dana tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, mungkin saja sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya tidak akan terpenuhi.

2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan.

Penghambat lain dalam pembangunan kepariwisataan yakni, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan Kabupaten Blitar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Selama ini kami belum berpedoman kepada perda, karena perda yang mengatur tentang kepariwisataan di Kabupaten Blitar belum ada. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Blitar sedang menyusun ranperda tentang kepawisataan. Ranperda tersebut saat ini sedang diproses, didalamnya terdapat tentang mengatur usaha pariwisata, dsb. Ranperda tersebut diperkirakan selesai tahun 2017 ini, dan nantinya siap dijadikan pedoman pembangunan pariwisata di Kabupaten Blitar. Saat ini ranperda tersebut masih dibahas, dan membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, misalnya masyarakat yang punya usaha travel, restoran, home stay, dsb. Jadi selama ini kami belum punya pedoman atau peraturan yang mengatur kepariwisataan, makanya sekarang ini tahunnya untuk membuat peraturan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa selama ini pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan belum berpedoman kepada peraturan daerah. Kabupaten Blitar belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan, akan tetapi saat ini sedang dibahas rancangan peraturan daerah yang mengatur kepariwisataan di Kabupaten Blitar. Pemerintah daerah sangat berharap agar rancangan peraturan daerah tersebut segera disahkan menjadi peraturan daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Kami punya harapan besar terhadap perda ini, karena perda mengatur segalanya tentang bentuk dan jenis pariwisata. Selama ini kiblatnya kami dalam pembangunan pariwisata hanya pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Sehingga harapan kami, perda ini nantinya akan menjadi bahan atau pedoman pelaksanaan kepariwisataan Kabupaten Blitar, kami semua berharap perda ini segera jadi. Kalau tahun ini ranperda sudah disahkan, berarti tahun depan kami sudah bisa menjadikan acuan atau pedoman untuk pembangunan kepariwisataan”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah sangat berharap dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan Kabupaten Blitar agar segera disahkan. Peraturan daerah tentang kepariwisataan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran. Sehingga pembangunan dan pengelolaan dapat dilakukan secara baik dan maksimal, serta dapat mewujudkan cita-cita dari kepariwisataan Kabupaten Blitar.

3. Kurangnya promosi

Selama ini belum ada promosi khusus dalam pembangunan dan pengelolaan pada wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran guna meningkatkan jumlah wisatawan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vivien Widhianawati selaku Kasi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Selama ini untuk promosi kolam renang penataran masuk dalam rangkaian promosi dari kawasan wisata penataran secara keseluruhan. Kalau untuk promosi kolam renang penataran sendiri kami memang belum ada. Tetapi biarpun belum ada promosi yang kami lakukan kolam renang penataran sudah otomatis *booming*, karena berada di kawasan wisata penataran”. (Wawancara tanggal 10 Mei 2017, pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anik selaku pengunjung kolam renang kawasan wisata candi penataran, bahwa:

“Saya tahu kolam renang penataran ini sudah sejak lama, biasanya sebelum kesini saya bersama keluarga berkunjung ke candi dahulu. Habis dari candi anak-anak mengajak kesini untuk berenang”. (Wawancara tanggal 25 Mei 2017, pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah belum melakukan promosi untuk wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran. Promosi kolam renang masuk dalam rangkaian dari kawasan wisata candi penataran secara keseluruhan, jadi sudah menjadi satu paket dengan kawasan wisata candi penataran. Dengan begitu para wisatawan juga sudah mengetahui keberadaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, karena keberadaannya tersebut.

4. Belum ada kerja sama dengan pihak swasta.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Blitar selama ini memang belum ada bentuk kerjasama dengan pihak swasta, termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Kemitraan yang terjalin selama ini yakni hanya antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arinal Huda selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, bahwa:

“Sampai dengan saat ini, dinas dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsinya juga mengelola kawasan wisata di Kabupaten Blitar. Ada 6 (enam) kawasan wisata yang dikelola oleh dinas, yakni kawasan wisata penataran, kawasan wisata rambut monte, kawasan wisata ngreco, kawasan wisata pantai jolosutro, kawasan wisata pantai serang dan kawasan wisata pantai tambakrejo. Dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata di destinasi tersebut, kami kerjasamanya belum dengan pihak swasta atau investor. Namun kami bekerjasama dengan masyarakat sekitar destinasi wisata. Memang untuk kedepannya kami ingin kerjasama dengan pihak swasta juga, dengan adanya semacam perjanjian kerjasama dalam pembangunan pariwisata. Tapi sampai saat ini kami memang belum bekerjasama dengan pihak swasta, namun kami masih bekerjasama langsung dengan masyarakat sekitar”. (Wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa belum adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, melainkan masih bekerjasama dengan masyarakat secara langsung. Pemerintah daerah berharap untuk kedepannya ingin bekerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran agar lebih berkembang dengan maksimal, serta dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Mengingat pihak swasta memiliki cakupan yang lebih luas.

C. Analisis Pembahasan

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang strategis untuk dikembangkan guna meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan pada wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak pada sektor ekonomi, karena dengan berkembangnya kepariwisataan tentu saja akan membuka kesempatan kerja, sehingga perekonomian masyarakat sekitar akan meningkat. Seperti yang diungkapkan oleh Wahab (1997:55) mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, *standart* hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata harus terencana dan dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang dikendaki dapat tercapai.

Pembangunan pariwisata kolam renang kawasan wisata candi penataran bukan lagi hanya pekerjaan bagi pemerintah daerah saja, tetapi semua pihak yang dapat mendukung perkembangan pariwisata bisa ikut serta dalam proses pembangunan dan pengelolaan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan atas segala yang telah direncanakan tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan. Seperti yang diungkapkan oleh Rohmad (2009:3):

“Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah daerah harus melakukan kerjasama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor swasta maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggungjawab sebagai pelaku dan penentu pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal, begitupun dengan sektor swasta”.

Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) hubungan dari ketiga *stakeholders* dapat berjalan yang selaras dan seimbang dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran demi terciptanya pariwisata yang berkualitas. Pemerintah daerah berperan dalam hal fasilitator kepada masyarakat, selanjutnya masyarakat sebagai pelaku pariwisata pada kolam renang kawasan wisata candi penataran, sedangkan dengan pihak swasta belum adanya kerjasama yang terjalin. Oleh sebab itu, peneliti lebih fokus pada kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan

masyarakat saja, dengan tidak mengabaikan peran pihak swasta sebagai salah satu unsur dari *good governance*.

Pemerintah daerah menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sangat diperlukan, karena masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima, tetapi masyarakat juga bisa sebagai pelaku pariwisata dan penentu arah pembangunan pariwisata. Sehingga pemerintah daerah dapat dengan mudah melaksanakan program kegiatan pembangunan pariwisata. Kedua *stakeholders* tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing, serta merasa saling membutuhkan dan membantu dalam proses pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran demi memberikan pelayanan prima kepada wisatawan. Selain memberikan pelayanan publik, tentunya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk mengatur urusan pariwisata daerah. Pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan agar wisatawan merasa nyaman dengan layanan dan fasilitas yang diberikan dalam kegiatan pariwisata. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran hendaknya dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan, karena berkaitan dengan mutu pelayanan kepada wisatawan.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dari waktu ke waktu. Sesuai dengan fungsinya pemerintah daerah sebagai fasilitator, bentuk dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran yaitu dengan cara membangun, memelihara dan melakukan pemasaran wisata, serta mengadakan pembinaan kepada pelaku pariwisata yang ikut berpartisipasi.

Pembangunan dilakukan dengan cara membangun infrastruktur kawasan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas publik yang bisa digunakan oleh wisatawan. Pemerintah daerah terus melakukan pembangunan dengan menambah bangunan induk kolam renang, jadi saat ini kolam renang yang ada lebih banyak dan luas. Selain itu, saat ini juga akan menambah bangunan kamar mandi bilas, karena kamar mandi bilas hanya ada satu tempat saja sehingga tidak merata. Pada kamar mandi bilas masih sering terjadi antrean panjang. Pemerintah daerah juga membangun tempat parkir yang luas, dan juga memasang pagar batas kawasan wisata kolam renang. Selain itu, dengan menambah fasilitas pendukung lainnya, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan agar merasa nyaman saat berada di kawasan kolam renang. Sehingga dapat berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung.

Setelah dengan menambah fasilitas sarana dan prasarana, pemerintah daerah melakukan pemeliharaan kawasan lingkungan kolam renang kawasan wisata candi penataran serta sarana dan prasarana yang telah ada.

Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan kenyamanan serta menjaga seluruh dari bagian destinasi wisata. Tentu saja dengan merawat sarana dan prasarana agar tetap digunakan sesuai dengan fungsinya, apabila ada yang rusak diperbaiki, dicat ulang, dan dilakukan pemeliharaan selanjutnya secara menerus.

Selanjutnya pemerintah daerah juga melakukan pemasaran pariwisata kolam renang kawasan wisata candi penataran, pemasaran dilakukan dengan cara menjaga kawasan wisata dan memberikan fasilitas yang mendukung kepariwisataan lainnya guna menarik minat wisatawan. Menjaga kawasan wisata agar tetap nyaman merupakan bagian dari pemasaran wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah, menjaga kerapian dan keamanan lingkungan dapat membuat wisatawan merasa senang berada di kawasan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Selain itu pemasaran juga dilakukan dengan cara menambah wahana yang mendukung kepariwisataan, seperti adanya *water boom* dan air mancur, adanya berbagai macam ayunan yang tersebar pada setiap lokasi kawasan wisata. Selanjutnya dengan menyediakan area-area yang biasa digunakan untuk menikmati suasana kawasan wisata, seperti adanya pujasera, tempat duduk, serta adanya hiburan musik dan karaoke, serta ada koneksi jaringan wifi yang bisa diakses secara gratis oleh wisatawan.

Pemerintah daerah juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat sebagai pengelola wisata dan pelaku usaha pariwisata dalam rangka pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Sumber daya manusia juga harus

dibangun dengan cara diberikan sosialisasi dan bimbingan, serta ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan pariwisata dengan cara menerapkan 7 (tujuh) prinsip sapta pesona. Terwujudnya sapta pesona ini maksudnya agar dapat mendorong minat wisatawan untuk berkunjung. Adapun bentuk dari prinsip-prinsip sapta pesona, yakni sebagai berikut:

1. Aman.
 - a) Memelihara keamanan lingkungan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
 - b) Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan.
 - c) Menunjukkan rasa bersahabat kepada wisatawan.
 - d) Membantu memberikan informasi kepada wisatawan.
 - e) Menolong dan melindungi wisatawan.
 - f) Meminimalkan resiko kecelakaan dalam menggunakan fasilitas.
2. Tertib.
 - a) Menaati peraturan yang berlaku.
 - b) Mewujudkan budaya antri.
 - c) Teratur dan rapi.
3. Bersih.
 - a) Petugas berpakaian dan berpenampilan yang bersih dan rapi.
 - b) Tidak membuang sampah sembarangan, melainkan pada tempatnya.
 - c) Menjaga kebersihan lingkungan, fasilitas sarana dan prasarana.
 - d) Menyediakan sajian makanan dan minuman yang bersih dan sehat.

4. Sejuk.
 - a) Menjaga suasana sejuk lingkungan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
 - b) Memelihara penghijauan dengan menanam pohon.
 - c) Memelihara ruang terbuka.
5. Indah.
 - a) Menjaga keindahan lingkungan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
 - b) Menjaga tatanan sesuai tempat dan fungsinya dengan baik.
6. Ramah.
 - a) Memberikan salam, senyum, sapa kepada wisatawan.
 - b) Bersikap baik dan siap dalam membantu wisatawan.
 - c) Menunjukkan sikap toleransi dan menghargai kepada wisatawan.
7. Kenangan.
 - a) Memberikan pengalaman wisata yang indah.
 - b) Menyediakan keunikan makanan dan minuman khas lokal.
 - c) Menyediakan cinderamata menarik.

Dengan terwujudnya sapta pesona tersebut, maka kualitas pelayanan publik yang diberikan akan lebih baik, serta akan berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan. Sehingga pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar dapat berjalan dengan baik.

b. Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan (Gaventa dan Valderama dalam Huraerah (2008:99)). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat berwujud dalam berbagai aktivitas. Masyarakat dilibatkan sebagai pelaku wisata, yakni sebagai petugas kawasan, petugas karcis parkir, petugas tiket masuk wisata, petugas kebersihan dan petugas keamanan, serta pelaku usaha pariwisata lainnya. Sumber daya manusia tersebut berasal dari masyarakat yang tinggal sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pemerintah daerah memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara langsung, dengan begitu masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkat sektor perekonomian.

Pemerintah daerah juga memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku pariwisata tentang kepariwisataan sesuai dengan 7 (tujuh) konsep sapta pesona. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, serta dapat meningkatkan jumlah wisatawan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pembinaan dilakukan dengan mendatangi destinasi wisata secara langsung, dengan memberikan pengarahan kepada pengelola dan pelaku usaha pariwisata lainnya, misalnya tentang mengelola fasilitas, menjaga kebersihan dan menjaga keamanan kawasan wisata.

Sehingga dengan begitu pemerintah daerah akan lebih mengetahui permasalahan yang terjadi pada lokasi wisata.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai pelaku pariwisata bagian dari pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran merasa sangat beruntung, dengan begitu mereka mendapatkan kesempatan kerja serta menambah pengetahuan dalam hal kepariwisataan. Pelaku usaha pariwisata, seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang oleh-oleh dan pedagang *souvenir* diberi izin untuk berjualan di kawasan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran tanpa harus dipungut biaya. Mereka hanya diminta untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata. Sehingga dengan adanya pembangunan kolam renang kawasan wisata candi penataran dampak positif yang ditimbulkan sangat besar, dapat meningkatkan perekonomian dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

c. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Kemitraan pada hakekatnya merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik Sulistiyani (2004:130). Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Domai (2010:83) kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan, adapun syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada dua belah pihak atau lebih.

Kemitraan tidak dapat terlaksana apabila hanya terdapat satu pihak yang bekerja, harus ada dua belah pihak ataupun lebih agar kemitraan dapat terlaksana. Tujuan dilaksanan kemitraan untuk saling melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bekerjasama, serta masing-masing pihak mendapatkan manfaat dari kemitraan yang terjalin. Dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran pihak yang menjalin kerjasama adalah pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang menunjuk Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan pihak dari masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran.

2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.

Kemitraan dapat dilakukan apabila tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak sama. Apabila tujuan yang ingin dicapai berbeda maka kemitraan tidak akan terlaksana, tentunya pihak yang terlibat akan lebih mementingkan tujuannya masing-masing. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemabangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada wisatawan dan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif.

3. Ada kesepakatan.

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran tidak ada kesepakatan yang secara resmi dan tertulis. Kegiatan kerjasama ini dilakukan atas dasar saling melengkapi dan membutuhkan demi tercapainya tujuan bersama. kesepakatan dari kedua *stakeholders* tersebut hanya melalui persetujuan secara langsung atau lisan dan musyawarah.

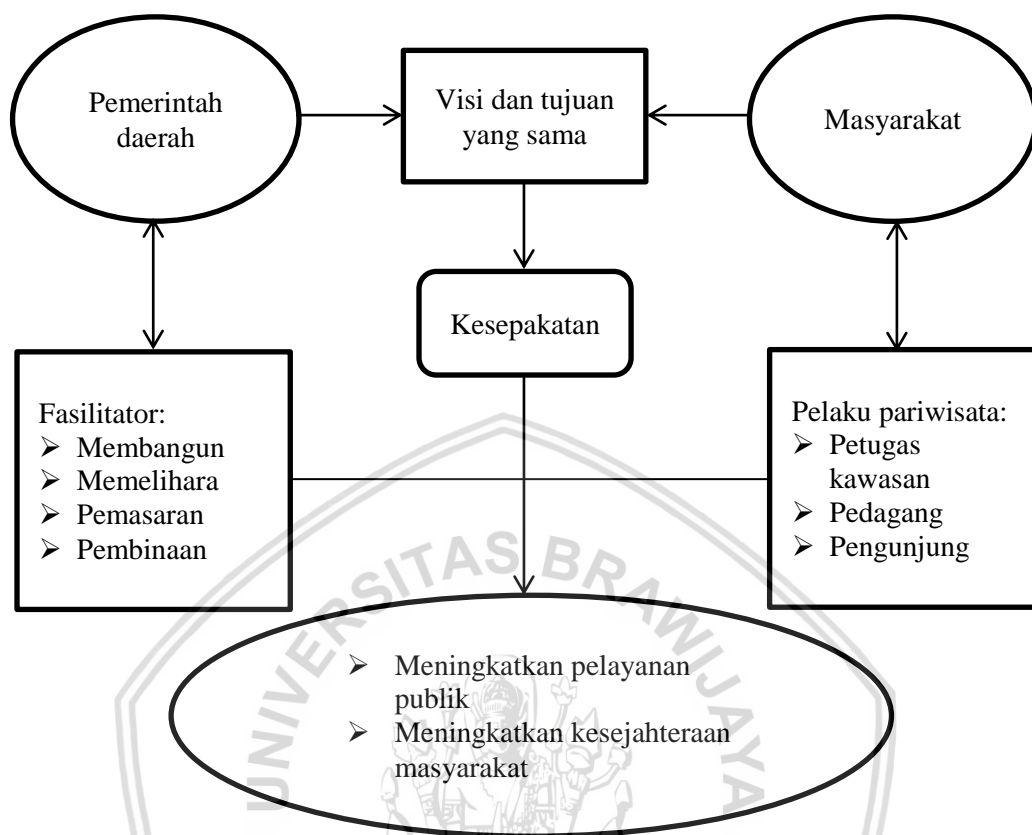
4. Saling membutuhkan

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran tentunya terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan. Masing-masing pihak merasa saling mebutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu untuk bekerja sendiri dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Atas keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah, masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki sekaligus menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terlihat pada kerjasama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi semua *stakeholders* yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

Berdasarkan pemaparan data dan informasi tersebut diketahui bahwa kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran adalah kemitraan mutualistik. Kemitraan mutualistik menurut Sulistyani dalam Domai (2010:97) adalah:

“Kemitraan mutualistik, yaitu kemitraan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, dimana dalam kemitraan tersebut pihak yang melakukan kemitraan memahami aspek penting dalam melakukan kemitraan. Sehingga pihak-pihak yang bekerjasama tersebut saling memberi manfaat satu sama lain, dan tujuan dapat tercapai secara maksimal”.

Sesuai dengan pengertian dari kemitraan mutualistik tersebut, terlihat pemerintah daerah dan masyarakat yang sama-sama menyadari aspek pentingnya dalam melakukan kemitraan, masing-masing pihak saling memberi dan menerima manfaat satu sama lainnya dari kemitraan yang terjalin. Sehingga tujuan dari pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat dicapai dengan mudah dan hasil yang optimal. Adapun skema kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 21. Skema Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran.

Sumber: Diolah penulis tahun 2017.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kolam Renang Kawasan Wisata Candi Penataran

a. Faktor Pendukung

1. Adanya rencana strategis (renstra).

Adanya rencana strategis (renstra) yang disusun oleh pemerintah daerah akan memudahkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wisata kolam renang kawasan wisata candi penataran. Program kerja setiap tahun disusun oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan pariwisata

pada tahun berikutnya. Adanya rencana strategis program kerja dari pemerintah daerah tersebut memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan program pembangunan kepariwisataan, khususnya pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedaaan Sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam kemitraan yang terkjaln untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Dari pihak pemerintah daerah sudah mampu menjalankan manajerial secara profesional. Begitu pula dari pihak masyarakat, akan tetapi masyarakat harus tetap mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

3. Dukungan atau perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar.

Pemerintah daerah Kabupaten Bliar memberikan dukungan penuh atas pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar memberikan dukungannya berupa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar. Selain dari pemerintah derah Kabupaten Blitar, dalam pembangunan dan pengelolaan wisata juga mendapatkan bantuan dana dari kementrian pariwisata. Dana tersebut agar digunakan untuk melangsungkan pembangunan dan pengelolaan, termasuk salah satunya pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

4. Kesadaran masyarakat mulai muncul.

Kesadaran masyarakat sekitar kolam renang kawasan wisata candi penataran sudah mulai muncul. Hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat sekitar untuk mengikuti sosialisasi dan pembinaan, dengan keterlibatan masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan menunjukkan bahawa pentingnya kepariwistaan. Masyarakat juga menyadari akan pentingnya meningkatkan prinsip-prinsip sapta pesona dalam melakukan usaha pariwisata, dimana wujud dari prinsip-prinsip sapta pesona merupakan yang menjadi keinginan wasatawan.

5. Keadaan lokasi yang mendukung

Lokasi kolam renang yang berada di kawasan wisata candi penataran menjadi keuntungan tersendiri, dimana candi penataran merupakan candi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Lokasi kolam renang yang bersebelahan dengan lokasi candi penataran ini bisa dimanfaatkan sekaligus sebagai promosi keberadaan wisata kolam renang. Kebanyakan wisatawan yang mengunjungi candi penataran setelah itu mereka menuju ke kolam renang untuk menikmati bermain air dan menikmati sarana dan prasarana yang tersedia.

6. Prasarana jalan akses menuju destinasi

Keberhasilan pembangunan pariwisata juga dipengaruhi oleh akses jalan untuk menuju lokasi destinasi. Saat ini untuk mengakses ke kolam renang kawasan wisata candi penataran dapat ditempuh dengan mudah. Infrastruktur jalan yang tersedia sudah bagus, ini karena jalur menuju ke kawasan wisata candi penataran terus dilakukan pemeliharanya. Sehingga pengelolaan prasarana jalan juga dilakukan dengan baik oleh dinas terkait.

b. Faktor Penghambat**1. Minimnya pendanaan/dana anggaran.**

Tidak dapat dipungkiri ketersediaan dana dalam pembangunan adalah hal yang sangat penting. Anggaran dana dari APBD Kabupaten Blitar yang diberikan untuk pembangunan kepariwisataan masih sangat minim, hal ini yang menyebabkan pembangunan dan pengelolaan pada kolam renang kawasan wisata candi penataran yang belum dapat dikatakan maksimal. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kepariwisataan, sehingga pemerintah daerah hanya mampu membangun sesuai dengan dana yang ada. Sehingga masih banyak fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai bagi wisatawan.

2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan.

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan di Kabupaten Blitar merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat. Akan tetapi saat ini sedang dibahas rancangan peraturan daerah yang mengatur kepariwisataan di Kabupaten Blitar. Pemerintah daerah sangat berharap agar rancangan peraturan daerah tersebut segera disahkan menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kabupaten Blitar, salah satunya pada kolam renang kawasan wisata candi penataran, sehingga pembangunan dan pengelolaan dapat dilakukan secara baik dan maksimal.

3. Kurangnya promosi.

Belum adanya promosi pariwisata secara khusus untuk kolam renang kawasan wisata candi penataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sekitar. Selama ini promosi kolam renang menjadi satu rangkaian dengan kawasan wisata candi penataran secara keseluruhan.

4. Belum ada kerjasama dengan pihak swasta.

Belum ada kerjasama dengan pihak swasta dapat dijadikan penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Dimana keberadaan pihak swasta dapat membantu berlangsungnya pembangunan kepariwisataan, pihak swasta dapat membantu dalam hal manajerial, modal, serta promosi pariwisata. Sehingga pemerintah daerah berharap untuk kedepannya ingin bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran. Mengingat pihak swasta memiliki cakupan yang luas, hal ini bertujuan agar lebih baik lagi pelayanan yang diberikan kepada wisatawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat terjalin dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, dimana kedua *stakeholders* tersebut bekerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak, serta saling melengkapi dan membantu dalam pembangunan dan pengelolaannya. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator terwujud dalam pembangunan dan pengelolaan dengan cara membangun dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana, melakukan pemasaran pariwisata serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari pelaku pariwisata. Sedangkan peran masyarakat terwujud dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sebagai pelaku pariwisata. Sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, tentunya berdampak pada perekonomian yang juga meningkat. Para pelaku pariwisata tersebut oleh pemerintah daerah diberikan pembinaan tentang kepariwisataan. Hal ini dilakukan bertujuan dalam rangka memberikan

pelayanan yang baik kepada wisatawan. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kemitraan yang terjalin, yakni kemitraan yang mutualistik. Dimana kemitraan yang saling menguntungkan masing-masing pihak yang bekerjasama. Setiap *stakeholders* memberikan manfaatnya dan saling membantu pelaksanaan pembangunan kepariwisataan. Sehingga tujuan dari pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mudah dan dengan hasil yang optimal.

2. Terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran, antara lain adanya rencana strategis program kerja dari pemerintah daerah yang memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah memadai dan mampu melaksanakan pembangunan dan pengelolaan meskipun dari pihak masyarakat harus tetap mendapatkan pendampingan, dukungan pemerintah daerah Kabupaten Blitar, kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata mulai muncul, lokasi kolam renang yang berada di sekitar kawasan wisata candi penataran dan akses menuju destinasi yang mudah untuk ditempuh. Selain faktor pendukung terdapat faktor-faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi

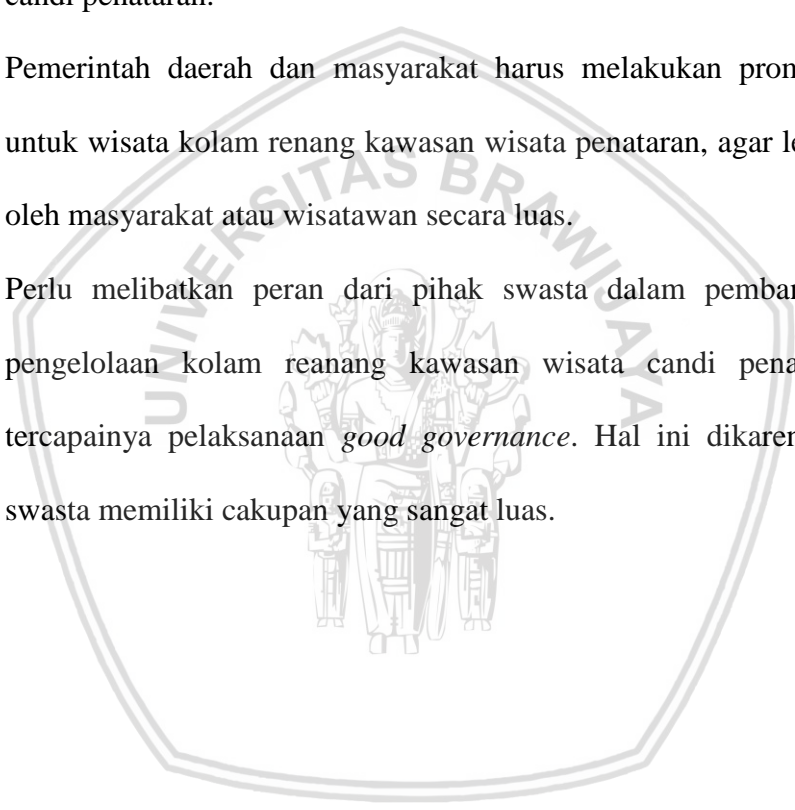
penataran, antara lain minimnya pendanaan dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar, belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan, belum ada promosi khusus untuk kolam renang kawasan wisata candi penataran kepada masyarakat luas, serta belum adanya peran dari pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran agar pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran bisa lebih baik, diantaranya adalah:

1. Pemerintah daerah dan masyarakat harus terus menjalin komunikasi dalam kemitraan, dengan terus mengadakan pembinaan dan bimbingan secara teknis. Hal ini dilakukan agar lebih harmonis hubungan diantara kedua *stakeholders* tersebut.
2. Pada kemitraan yang terjalin dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran tersebut, sesungguhnya harus ada kesepakatan yang tertulis dan ada perlindungan hukumnya, agar masing-masing pihak mendapatkan hak atas kesepakatan yang telah disepakati serta tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.
3. Rancangan peraturan daerah tentang kepariwisataan agar segera disahkan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Blitar, khususnya pada pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.

4. Pemerintah harus lebih responsif apabila dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
5. Masyarakat harus lebih kreatif dan inovatif dalam ikut berpartisipasi untuk pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran.
6. Pemerintah daerah dan masyarakat harus melakukan promosi khusus untuk wisata kolam renang kawasan wisata penataran, agar lebih dikenal oleh masyarakat atau wisatawan secara luas.
7. Perlu melibatkan peran dari pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan kolam renang kawasan wisata candi penataran demi tercapainya pelaksanaan *good governance*. Hal ini dikarenakan pihak swasta memiliki cakupan yang sangat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonymous. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Blitar*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar. Online diakses melalui (https://blitarkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kabupaten-Blitar-2015---.pdf) pada 1 November 2016.
- Basuki, Ananto Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD FEB UB.
- Conyers, Dian. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Kebijakan Kerjasama Antara Daerah dalam Perspektif Sound Governance*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- _____. 2011. *Sound Governance*. Malang: UB Press.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hanafi, Imam & Nugroho Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Hasan, Iqbal. M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Kartasasmita, Ginanjar.. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Mathew. B., A. Michael Huberman, dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Singapore: Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M. R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Metode Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta: Bima Aksara
- Pendit, Nyoman. S. 2004. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, Gede. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.

- Rewansyah, Asnawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima.
- Rohmad, Zaini, dkk. 2009. *Kebijakan Kemitraan Publik, Privat, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Studi tentang Kebijakan Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Malang Raya)*. FISIP UNS. Surakarta: Artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Afektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, S. 2005. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agriek YPN Malang.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Komunikasi Massa*. Bandung: Bina Citra.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James. J. 1993. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Syafiie, Inu K. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, Salah, dkk. 1997. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Yoeti, A. Oka. 1994. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa Offset.